

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN STRATEGIS UNIVERSITAS**



**IMPLEMENTASI PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**  
**BAGI PERANGKAT DESA UNTUK MENCAPAI**  
***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA***  
**(STUDI PADA PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA, FISH UNESA)**

**TIM PENGUSUL:**

<b>MEIRINAWATI</b>	<b>NIDN</b>	<b>0021056404</b>
<b>INDAH PRABAWATI</b>	<b>NIDN</b>	<b>0029077404</b>
<b>EVA HANY FANIDA</b>	<b>NIDN</b>	<b>0019018306</b>
<b>SUHARTININGSIH</b>	<b>NIDN</b>	<b>0022115702</b>

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
**DESEMBER 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN KEBIJAKAN STRATEGIS UNIVERSITAS**

Judul Penelitian : Implementasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Bagi Perangkat Desa Untuk Mencapai *Sustainable Goals* (SDGs) Desa (Studi Pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, Unesa)

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 580/Sosial Humaniora

Bidang Fokus Penelitian :  
Program Pembelajaran Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dra Meirinawati, M.AP  
b. NIDN : 0021056804  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Administrasi Negara  
e. Nomor HP : 08113400528  
f. Alamat surel (e-mail) : meirinawati@unesa.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Indah Prabawati, S.Sos., M.Si  
b. NIDN : 0029077404  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP  
b. NIDN : 0019018306  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : Dra. Suhartiningsih, M.Pd  
b. NIDN : 0022115702  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Lama Penelitian Keseluruhan : 8 bulan

Usulan Penelitian Tahun Ke- : -Biaya Penelitian

Keseluruhan : Rp 50.000.000,-

Biaya Penelitian:

- diusulkan ke LPPM UNESA : Rp. 50.000.000,-

Mengetahui,  
Dekan FISH



Prof. Dr. Muhammad Turhan Yani,  
MA.NIP. 197703012002121003

Surabaya, 26 Desember 2022  
Ketua Peneliti,

Dra Meirinawati, M.AP NIP  
196805212000032001

Menyetujui,  
Ketua LPPM



Prof. Dr. Darni, M.Hum.  
NIP. 196509261990022001

## RINGKASAN

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satu faktor yang menjadi penting adalah kualitas pendidikan yang baik secara fisik ataupun nonfisik.. Konsepsi dalam konteks kerangka pembangunan pasca 2015, disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Upaya pencapaian SDGs desa khususnya tujuan keempat, mewujudkan pendidikan desa berkualitas, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri melalui afirmasi pelaksanaan pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), tenaga pendamping profesional (pendamping desa) berbasis rekognisi pembelajaran lampau juga program merdeka belajar. Pada tahun 2022 diimplementasikan program RPL Desa untuk Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Pilot program RPL Desa dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Salah satu prodi yang ikut serta didalamnya adalah prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan Administrasi Publik Unesa.

Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data melalui pendapat Miles dan Huberman. Fokus penelitian melalui Teori implementasi kebijakan dengan model pendekatan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dari agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan disposisi dari pelaksana. Penelitian ini menghasilkan TKT level tiga dengan target luaran berupa publikasi jurnal internasional atau prosiding seminar internasional.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, (1). Indikator pertama dalam upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tahun 2021 mengadakan program bantuan pemerintah penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A2 adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Program ini dilakukan kerjasama baik perguruan tinggi negeri juga perguruan tinggi swasta yang diwadahi ke dalam Forum Perguruan Tinggi Desa (PERTIDES). (2). Indikator kedua, perlu dilakukan RPL terhadap pengalaman kerja di desa menjadi kredit mata kuliah untuk menempuh pendidikan lanjut pada jenjang S1/D4 dan S2. Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara beserta penyanggah dana beasiswa melaksanakan RPL Desa melalui program *piloting* oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menyediakan Uang Kuliah Tunggal bagi 1600 peserta RPL Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, pengelola BUM Des/ BUM Desma, Tenaga Pendamping (TPP), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan pegiat lainnya yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro. Fasilitas yang diberikan oleh pihak Unesa dan Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro dan berupa sarana dan prasarana secara luring maupun daring. (3) Indikator ketiga, Program RPL diawali pelaksanaan pendaftaran dan pembukaan sesuai jadwal. Seleksi pihak Universitas untuk mengetahui kriteria calon peserta. Pendaftaran RPL Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara diikuti oleh 325 calon peserta. Dalam proses seleksinya 295 mahasiswa RPL. Ada 282 mahasiswa RPL Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara yang aktif terbagi dalam 6 kelas. (4). Indikator keempat, kelas RPL sejumlah 6 kelas tentu menambah beban tugas

mengajar bagi para dosen di Prodi. Hanya saja perbandingan jam kerja yang dilakukan cukup melebihi kapasitas jam kerja daripada biasanya. Namun hal tersebut dapat ditangani oleh para agen pelaksana kampus dengan baik. (5). Indikator kelima, untuk memperkuat kelembagaan Desa, maka Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Unesa bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan kegiatan *Workshop* dengan tujuan memberikan pemahaman kepada perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro agar pembangunan di desa menjadi lebih terarah terhadap pentingnya pelaksanaan *SDGs* dan pencapaian *SDGs*. Antusiasme program ini bukan hanya dirasakan oleh para perangkat desa yang mengikuti program ini. Tetapi juga dirasakan oleh warga desa. Warga desa memiliki harapan lebih terhadap program RPL yang dilaksanakan. (6). Indikator keenam, kemajuan dan capaian desa-desa tidak lepas dari dukungan kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak. Artinya, pencapaian *SDGs* Desa akan sangat bergantung dari komitmen kuat dan sinergi dari semua pihak. Kabupaten Bojonegoro sangat mendukung program RPL ini dan dapat dilihat dari izin yang diberikan oleh kepala desa kepada para pegawai yang akan mendaftar program ini. Unesa juga melakukan monev tiap semester dilakukan oleh Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.

Kata Kunci: Implementasi, Program Rekognisi Masa Lampau (RPL), *Sustainable Development Goals (SDGs)*

## PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Bagi Perangkat Desa Untuk Mencapai *Sustainable DevelopmentGoals (SDGs)* Desa (Studi Pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, Unesa “ tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi program RPL bagi Perangkat Desa untuk mencapai SDGs Desa khususnya pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA. Harapannya melalui penelitian ini dapat diperoleh data dalam hal mendukung implementasi program RPL agar menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga laporan penelitian ini dapat selesai. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Surabaya, 26 Desember 2022

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	III
PRAKATA.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL .....	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Definisi Operasional Variabel .....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	6
A. Landasan Teori.....	6
B. Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn .....	8
C. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau .....	11
D. Sustainable Development Goals .....	11
E. Peta Jalan Penelitian.....	12
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	15
A. Tujuan Penelitian.....	15
B. Manfaat Penelitian .....	15
BAB IV METODE PENELITIAN .....	16
A. Jenis Penelitian .....	16
B. Lokasi Penelitian .....	16
C. Fokus Penelitian .....	16
D. Informan Penelitian.....	17
E. Sumber Data Penelitian.....	17
F. Teknik Pengumpulan Data .....	18
G. Teknik Analisis Data.....	18
Sumber : Miles dan Huberman (1992) .....	19
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
A. HASIL.....	21
H. PEMBAHASAN .....	42
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. KESIMPULAN .....	45
B. SARAN.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Pendaftaran Program RPL di UNY dan Unesa .....	27
---------------------------------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	8
Gambar 2. Penelitian Manajemen Strategi FISHUnesa dalam Peta JalanPenelitian .....	12
Gambar 3. Analisa Data Model Interaktif.....	19
Gambar 4. Buku Panduan Program Sarjana .....	26
Gambar 5 Peta Pembagian Kelas RPL Desa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara .....	28
Gambar 6 Perkuliahan Perdana Mahasiswa Program RPL Desa Tahun 2022 .....	30
Gambar 7 Pengarahan Untuk Mahasiswa RPL Desa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara.....	31
Gambar 8 Kuliah Daring Mahasiswa Program RPL Desa .....	33
Gambar 9 <i>Workshop</i> Kolaborasi Penguatan Kelembagaan Desa dalam Rangka Percepatan Pencapaian .....	35
Gambar 10.....	39



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satu faktor yang menjadi penting adalah kualitas pendidikan yang baik secara fisik ataupun nonfisik. Pendidikan dapat mempengaruhi secara penuh pertumbuhan bangsa. Bukan hanya pada produktivitas tetapi juga berpengaruh pada kualitas dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan mengenai Pendidikan secara luas.

Sampai saat ini Indonesia masih menghadapi hambatan-hambatan yang masih belum terselesaikan dengan baik. Salah satu hambatan yang masih ada hingga saat ini adalah masalah mengenai kurangnya biaya dan fasilitas yang digunakan yang bersifat tidak material seperti semangat serta niat untuk sekolah yang kurang dan malas belajar. Hal tersebut dapat mengantarkan sebuah negara masuk ke dalam bentuk kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan didefinisikan sebagai proporsi pendapatan rata-rata penduduk dengan pertimbangan kemampuan daya beli berada kurang dari 1,25 USD Amerika per hari. Oleh karenanya pemerintah memiliki kewajiban agar setiap warga negara memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan hak untuk menikmati standar kehidupan yang layak serta berupaya mengentaskan kemiskinan program-program jaminan social. Masalah lain juga akan muncul ketika kemiskinan mencapai angka yang tinggi yaitu kelaparan, ketahanan pangan dan gizi yang kurang baik, serta pertanian yang terhenti dan belum terjaminnya kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk seluruh usia.

Dampak-dampak tersebut dapat merugikan atau mengganggu kehidupan manusia. Perhatian dunia sejak tahun 2000 menyepakati 8 tujuan pembangunan global yang spesifik dan tekstur yang disebut *Millennium Development Goals* (MDGs) yaitu mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan. Pencapaian tujuan dalam MDGs memiliki target waktu hingga 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015,

*Millennium Development Goals (MDGs).*

Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan *Millennium Development Goals (MDGs)* di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MDGs sekarang diganti SDGs. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Untuk menjalankan upaya pencapaian *sustainable development goals* desa khususnya tujuan keempat, mewujudkan pendidikan desa berkualitas, Maka Kemendiknas, Kemendagri, dan Transmigrasi mengembangkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja tentang afirmasi pelaksanaan pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), tenaga pendamping profesional (pendamping desa) berbasis rekognisi pembelajaran lampau juga program merdeka belajar.

Pengembangan program RPL Desa berupaya memberikan kesempatan pada para pegiat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk dapat menempuh program Pendidikan formal jenjang sarjana. Sebagai aksi nyata, maka tahun 2022 diimplementasikannya pengembangan pilot program RPL Desa untuk Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Pilot program RPL Desa dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Salah satu prodi yang ikut serta didalamnya adalah prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Masalah yang muncul yaitu pada pemahaman mahasiswa terkait pada matakuliah yang diberikan dosen. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi perangkat desa untuk mencapai *Sustainable Development goals (SDGs)* desa pada prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISIP Unesa.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Bagi Perangkat Desa Untuk Mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa di Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rumusan pertanyaan pada penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimana implementasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Bagi Perangkat Desa Untuk Mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa Pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, Unesa?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan dari fokus penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk :

Mendeskripsikan Implementasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Bagi Perangkat Desa Untuk Mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa Pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, Unesa

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan pada penelitian ini, baik itu manfaat teoritis ataupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk peneliti dan menambah pengetahuan peneliti dalam hal implementasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi perangkat desa untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, Unesa. Diharapkan pula dengan adanya penelitian ini dapat melatih berfikir secara ilmiah berdasarkan prinsip ilmu yang telah dipelajari semasa kuliah.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai implementasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi perangkat desa yang sudah mulai diterapkan pada Pemkab Bojonegoro dan juga diharapkan memberikan wawasan pengetahuan lebih mengenai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa

b. Bagi Kementerian Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam merealisasikan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia khususnya di kawasan desa dan perdesaan pada umumnya masih rendah dan sejalan dengan komitmen upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

c. Bagi Tenaga Pendidik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi tenaga pendidik bersama pimpinan perguruan tinggi untuk terus melakukan perbaikan dan pembaharuan dalam proses implementasi program rekognisi pembelajaran lampau.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian ini.

## E. Definisi Operasional Variabel

### 1. Perguruan Tinggi

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi

### 2. Perangkat Desa

Setiap individu Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengelola BUM Desa/BUM Desma, Tenaga Pendamping Profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), serta Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki kesamaan kesempatan untuk menempuh Pendidikan tinggi melalui RPL Desa.

### 3. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Sebuah program yang digunakan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap pengalaman kerja di desa menjadi kredit mata kuliah untuk menempuh Pendidikan lanjut tingkat S1.

### 4. *Sustainable Development Goals*

Upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan delapan belas tujuan

### 5. Implementasi Kebijakan

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah baik individu ataupun

kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan sesuai dengan rumusan kebijakan

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konsep Implementasi**

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015:3) mengemukakan bahwa implementasi merupakan pemahaman yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha- usaha untuk melakukan administrasi ataupun menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Grindle (Mulyadi, 2015:47) juga berpendapat bahwa implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat tertentu.

Pressman dan Wildavsky (Pressman dan Wildavsky, 1978:21) menyatakan bahwa “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” yang artinya membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Secara etimologis dapat diartikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan menggunakan sarana (alat) untuk mendapatkan hasil.

##### **2. Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan cara sebuah kebijakan untuk mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan, terdapat dua pilihan langkah, yaitu dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* dan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2011:618).

Berdasarkan teori implementasi kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan adalah proses yang penting karena suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Namun jika persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan dilakukan dengan baik, jika kebijakan tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak tercapai. Sehingga untuk mencapai tujuan kebijakan, maka harus mempersiapkan dan merencanakan perumusan kebijakan dan implementasinya dengan baik.

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup usaha dalam mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam

waktu tertentu dengan tujuan melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Winarno, 2008).

Van Meter dan Van Horn (Kurniawan dan Maani, 2019) memberikan penjelasan bahwa pengukuran keberhasilan kinerja implementasi kebijakan harus menjelaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, sebab ketercapaian atas tercapainya standar dan sasaran tersebut menjadi penilaian kinerja kebijakan. Meter dan Horn (Subarsono, 2011:100) menambahkan bahwa implementasi kebijakan memerlukan sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non- manusia (*non-human resources*). Berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, jika dukungan yang diberikan sejalan maka implementasi kebijakan akan berhasil, namun sebaliknya apa bila tidak mendapatkan dukungan kemungkinan kegagalan dalam implementasi kebijakan akan terjadi (Agustino, 2012:144).

### **3. Model Implementasi Kebijakan**

Kebijakan merupakan keputusan yang telah ditetapkan dan mempunyai tujuan tertentu, agar terimplementasi dengan baik maka diperlukan adanya suatu pendekatan atau yang disebut dengan model. Adapun model implementasi kebijakan tersebut diantaranya adalah :

- a. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) Model yang menjelaskan bahwa hasil kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel bebas yang saling berkaitan, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik
- b. Model Implementasi Kebijakan Lewis dan Flynn (1978)  
Model yang memandang implementasi sebagai tindakan dari individu yang dibatasi oleh dunia luar organisasi dan konteks institusional.
- c. Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980)  
Model implementasi yang ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Tingkat keberhasilannya sangat ditentukan dari derajat implementasi dari kebijakan tersebut.
- d. Model Implementasi kebijakan Edward III (1980)

Faktor-faktor yang dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, dimana salah satu faktor berpengaruh pada faktor lainnya dan dapat berdampak pada implementasi kebijakan

e. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1980)

Pada model implementasi ini terdapat tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu variabel independen, variabel *intervening*, variabel dependen.

**B. Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn**

Implementasi kebijakan dengan model pendekatan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi kebijakan yang ditawarkan digambarkan pada gambar.

**Gambar 1**

**Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn**



Sumber : van Meter van Horn dalam Agustino (2016:136)



Gambar 1 menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan dengan model Van Meter dan van Horn. Model ini menentukan dan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan menggunakan model ini, dapat membentuk indikator yang memuaskan serta dapat mengumpulkan data yang tepat. Sehingga memiliki harapan yang besar dalam menjabarkan proses dengan mengamati implementasi kebijakan dibandingkan dengan hanya menghubungkan variable bebas dan terikat dengan cara yang tidak terarah. Model ini menggambarkan bahwa kebijakan dasar yang memiliki enam variabel dengan cara membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja, variabel tersebut yaitu :

a. Standar dan tujuan kebijakan

Standar dan tujuan harus telah ditentukan pada sebuah kebijakan yang kemudian untuk dilaksanakan oleh pelaksana. Kinerja kebijakan digunakan untuk menilai ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Sehingga standar dan tujuan tersebut harus dirumuskan secara spesifik dan konkret (Wibawa, 1994:20). Menurut Van Meter dan van Horn, tahap paling penting dalam menganalisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi indicator pencapaian. Standar dan tujuan kebijakan yang telah direalisasikan dinilai oleh indicator kinerja. Hal ini dikarenakan berguna dalam merumuskan tujuan keputusan secara menyeluruh

b. Sumber daya

Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) berpendapat bahwa sumber daya kebijakan juga sangat penting. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu untuk memperlancar administrasi dalam mengimplementasikan kebijakan harus menyediakan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud yaitu dana atau intensif lain. Karena dana yang terbatas dapat menjadi faktor yang menggagalkan implementasi kebijakan

c. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974), kejelasan standar dan tujuan serta ketepatan dan konsistensi dalam komunikasi standar dan tujuan tersebut menentukan implementasi kebijakan yang efektif. Van Meter

dan Van Horn juga berpendapat bahwa mekanisme dan prosedur Lembaga dibutuhkan dalam implementasi yang berhasil. Karena hal tersebut sangat membantu pelaksana dalam bertindak dengan cara yang konsisten. Posisi hierarki pejabat dalam organisasi menyebabkan mereka memiliki pengaruh dan kekuasaan personil. Pengaruh dan kekuasaan yang dimaksud yaitu rekrutmen dan seleksi, kontrol atas alokasi anggaran, jenjang karir bawahan, dapat mempengaruhi perilaku bawahan serta memiliki kewenangan dalam menanggapi pencapaian kebijakan

d. Karakteristik dari agen pelaksana / *implementor*

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa dari struktur birokrasi maka dapat terlihat karakteristik dari badan pelaksana. Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi secara berulang dalam badan eksekutif yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki dengan menjalankan kebijakan tersebut. Ciri-ciri struktur formal dan atribut yang tidak formal menjadi komponen yang penting dari model ini. Selain itu memberikan perhatian pada ikatan badan pelaksana dengan pemeran dalam sistem yang menyampaikan kebijakan sangat perlu dilakukan (Winarno, 2004:116)

e. Kondisi ekonomi social dan politik

Efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik. Hal tersebut diambil dari inferensi logis dari bagan sistem kebijakan. Faktor yang juga menjadi pengaruh dari hasil implementasi kebijakan yaitu ikut sertanya campuran lingkungan internal. Sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan juga dapat disebabkan dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif. Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan berjalan lancar dan terkendali, maka lingkungan eksternal harus kondusif

f. Disposisi dari pelaksana

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sikap penerimaan ataupun penolakan dari agen pelaksana kebijakan. Hal tersebut terjadi dikarena kebijakan yang dilaksanakn bukan hasil dari pemikiran warga setempat yang mengenal dengan baik terhadap permasalahan dan persoalan yang dirasakan. Namun, kebijakan publik biasanya bersifat *top down* ini memungkinkan para

pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan (Agustinus 2006)

Pemahaman standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Karena kegagalan suatu implementasi kebijakan yang telah berhasil disebabkan karena para pelaksana tidak menyadari standar dan tujuan kebijakan. Sehingga arah disposisi para pelaksana menjadi hal yang penting juga. Gagalnya para pelaksana melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka menolak tujuan kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). Oleh karena itu, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Karena gagalnya implementasi disebabkan karena terbatasnya intensitas disposisi

### **C. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau**

Berdasarkan buku panduan program sarjana rekognisi pembelajaran lampau desa (RPL Desa) 2022-2024 (2022:7) terdapat beberapa tahapan rekognisi yang harus dilaksanakan oleh calon mahasiswa. Tahapan rekognisi dalam RPL Desa yang dimaksud yaitu pemilihan program studi, pemilihan mata kuliah yang di-RPL kan, pengisian formulir evaluasi diri, verifikasi dokumen, penilaian/ asesmen oleh asesor, pengumuman hasil asesmen, masa samgah calon mahasiswa, keputusan hasil asesmen RPL, pelaporan keputusan hasil asesmen RPL

### **D. Sustainable Development Goals**

*Sustainable Development Goals (SDGs)* dirancang sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang belum tercapai tujuannya sampai pada akhir tahun 2015. SDGs adalah salah satu rencana aksi untuk umat manusia, planet dan kemakmuran. Juga tujuannya untuk mengatasi kemiskinan yang ekstrim adalah tantangan global yang paling besar dan merupakan prasyarat yang tidak dapat dilanjutkan untuk pembangunan berkelanjutan.

Menurut Yohanna *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Post-2015, juga dikenal sebagai *Sustainable Development Goals (SDGs)* didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis,

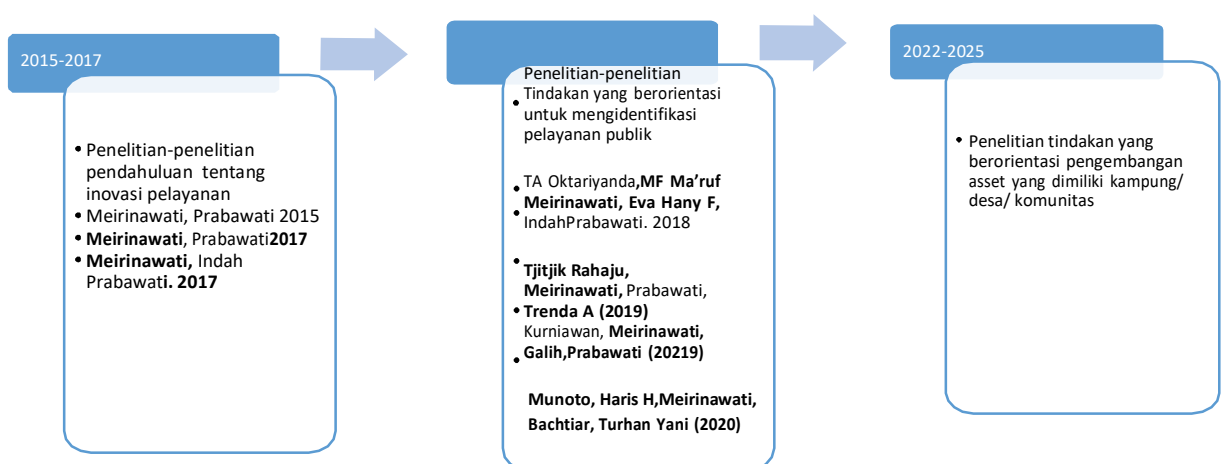
penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization (CSO)*. Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini.

### E. Peta Jalan Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan merupakan salah satu fokus kajian citas akademik khususnya di Jurusan Administrasi Publik. Proposal Implementasi Kebijakan ini merupakan bagian dari rumpun penelitian Tatakelola (*Governance*) yang dikembangkan oleh Jurusan Administrasi Publik, FISH Unesa. Implementasi kebijakan berupaya untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan dalam suatu instansi terhadap suatu progam kegiatan. Dalam hal ini untuk melihat pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau desa (RPL Desa) yang ditujukan bagi perangkat desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Oleh sebab itu, penelitian ini terkait erat dengan penelitian-penelitian terdahulu dari peneliti dan juga penelitian-penelitian selanjutnya. Keterkaitan dan rangkaian penelitian tersebut dapat digambarkan dalam peta jalan penelitian sebagaiberikut :

**Gambar 2. Penelitian Manajemen Strategi FISH Unesa dalam Peta Jalan Penelitian Governance di Jurusan Administrasi Publik, FISH Unesa**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Peta jalan penelitian dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu studi-studi pendahuluan, penelitian tindakan, dan penelitian tindakan yang berorientasi pengembangan. Tahap pertama, yaitu tahap penelitian pendahuluan. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Meirinawati. Pada tahun 2015 Meirinawati Bersama Indah Prabawati melalui tulisan yang terbit di Jurnal dengan judul Inovasi *Electronic Performance (E-Performance)* untuk Meningkatkan Kompetensi Pegawai. Selanjutnya Meirinawati dan Indah Prabawati pada tahun 2017 dengan penelitian berjudul *E-Government Innovation in Service Excellence Implementation of E-Health in Health Care*. Hal itu untuk menjelaskan tentang inovasi yang diciptakan oleh instansi Kesehatan untuk memberikan kualitas pelayanan bagi masyarakatnya. Masih pada tahun 2017 Meirinawati dan Indah Prabawati melakukan penelitian tentang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam mewujudkan zero accident, berusaha untuk melihat tentang pentingnya dalam instansi untuk menerapkan tentang K3.

Tahap kedua dalam peta jalan penelitian ini adalah tahun 2018-2021. Pada tahap ini hasil-hasil penelitian tahap pertama telah menjadi rujukan kegiatan selanjutnya untuk melihat strategi yang perlu dilakukan dalam instansi untuk meningkatkan layanannya. Pada tahun 2018 selanjutnya penelitian Eva Hany F, Meirinawati, Trena Aktiva O dan M Farid M dengan judul Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Pendidikan KRS Online (Studi pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa. Hasil penelitian ini untuk mendeskripsikan kepuasan mahasiswa dalam pelayanan KRS Online yang diterapkan di salah satu prodi yang ada di FISH Unesa.

Selanjutnya seperti Meirinawati, Eva Hany Fanida dan Indah Prabawati pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul *Strategy Management of Hazardous and Toxic Waste Processing by PTV Artama Senrosa Indonesia (Study of Transporting and Collecting Hazardous and Toxic Waste)*. Dalam hal untuk melihat perlunya manajemen strategi dalam suatu instansi dengan didasarkan pada analisis lingkungan berdasar pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menekankan pada Analisa SWOT.

Selanjutnya tahun 2019, Tjitjik Rahaju, Meirinawati, Indah Prabawati dan Trena Aktiva O melakukan penelitian Akseibilitas Transportasi Publik (Studi tentang

Peningkatan Layanan Publik Melalui Inovasi Suroboyo Bus di Kota Surabaya). Penelitian ini untuk melihat inovasi Bus bagi masyarakat yang membayar memakai boto atau gelas plastik. Meirinawati dan Galih Wahyu Pradana melakukan studi pada tahun 2019 dan menemukan fakta bahwa kemampuan tatakelola dokumen perangkat di tingkat desa cukup lemah. Situasi ini menjadi tantangan desa untuk merumuskan strategi dan program pembangunan yang berlandaskan pada asset atau sumberdaya setempat. Beberapa kelemahan tersebut diantaranya (1) Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang system tatakelola dokumen desa; (2) masih terbatasnya ketrampilan aparat dalam penerapan system tata kelola dokumen; (3) Terbatasnya pemahaman perangkat tentang format baru buku register desa dan keterkaitan tata kelola kearsipan yang baik dengan pencatatan buku register desa. Melanjutkan upaya-upaya tersebut, pada tahun 2021, penelitian tentang Manajemen Strategi di FISH Unesa diajukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi strategi yang dibuat dalam Perkuliahan Tatap Muka Terbatas dan Bertahap (PTMTB). Seperti diketahui selama masa pandemic Covid-19, perkuliahan di Unesa juga di FISH melakukan perkuliahan secara daring. Melalui PTMTB, strategi yang dibuat selanjutnya bagaimana implementasi dari strategi tersebut juga evaluasi selama perkuliahan melalui system PTMTB. Target kegiatan pada dari fase kedua ini adalah sebagai dasar penyusunan strategi untuk meningkatkan mutu Pendidikan dalam suatu instansi.

Tahap ketiga dari peta jalan penelitian ini adalah tahun 2022 hingga 2025. Pada fase ini penelitian akan diwujudkan dalam bentuk penelitian-penelitian tindakan yang berorientasi pada pengembangan strategi dalam instansi pendidikan lainnya pada tahun-tahun berikutnya

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian Implementasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Bagi Perangkat Desa Untuk Mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa (Studi Pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, Unesa) dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi perangkat desa untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) desa pada prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA
- b. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari program RPL bagi perangkat desa Kabupaten Bojonegoro pada prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA

##### **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan pada program maupun kebijakan dalam hal mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa.
- b. Serta memberikan rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang pendidikan.
- c. Tersedianya data mengenai Implementasi Program RPL Bagi Perangkat Desa Kabupaten Bojonegoro di Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, mengidentifikasi, atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Untuk penelitian kali ini lokasi penelitian berada di Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

#### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan, maka ditentukan fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini dengan menggunakan teori kesiapan Perguruan Tinggi Negeri Menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Fungsi adanya fokus penelitian adalah sebagai batasan penelitian agar informasi yang dikumpulkan tidak keluar dari topik pembahasan dan dapat memudahkan peneliti dalam mengolah informasi atau data yang diperoleh.

Fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
4. Karakteristik dari agen pelaksana / *implementor*
5. Kondisi ekonomi, social dan politik
6. Disposisi dari pelaksana



#### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan pihak yang dianggap memiliki kompetensi terkait kajian yang akan diteliti. Penentuan Informan dalam penelitian ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu mereka yang dianggap mempunyai informasi dalam kaitannya dengan penelitian tersebut.

Oleh karena itu, informan atau narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FISH Unesa yaitu Ibu Dr. Wiwik Sri Utami, MP
2. Ketua Jurusan Administrasi Publik yaitu Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si
3. Ketua LP3 yaitu Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd
4. Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si
5. Agus Utomo (Kepala Desa Bakulan, Kecamatan Temayang)
6. Deni Susanto (Kasi Pemerintahan Desa Clebung, Kecamatan Bubulan)

#### **E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian merupakan hal yang krusial. Hal ini karena penelitian membutuhkan data yang akan dianalisa dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah. Pendapat dari Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2015:157) mengatakan sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, data tambahan seperti dokumen-dokumen. Sumber data berdasarkan pada jenisnya dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Purhantara (2010:79), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:225), data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder diperoleh melalui catatab-catatan atau dokumentasi resmi lainnya yang mendukung data primer, yaitu dokumentasi, data laporan atau arsip-arsip. Oleh karena itu, batasan data sekunder mencakup data yang mendukung isi dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2012:137) mengatakan bahwa pengumpulan data dilaksanakan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah :

### **1. Wawancara (*interview*)**

Peneliti melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung. Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan baik yang telah digariskan maupun nantinya muncul secara spontan. Sehingga data dapat diperoleh secara lengkap dan maksimal serta memudahkan untuk memperoleh data yang diinginkan secara mendalam.

### **2. Observasi**

Teknik ini dipilih untuk mengumpulkan data pendukung dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian terkait kesiapan FISH menuju PTN-BH.

### **3. Studi Dokumentasi**

Teknik dokumentasi dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis (data sekunder) berupa peraturan pemerintah, surat keputusan Rektor, kebijakan fakultas, bahan-bahan laporan dan arsip-arsip lain yang relevan dengan fokus penelitian guna melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

## **G. Teknik Analisis Data**

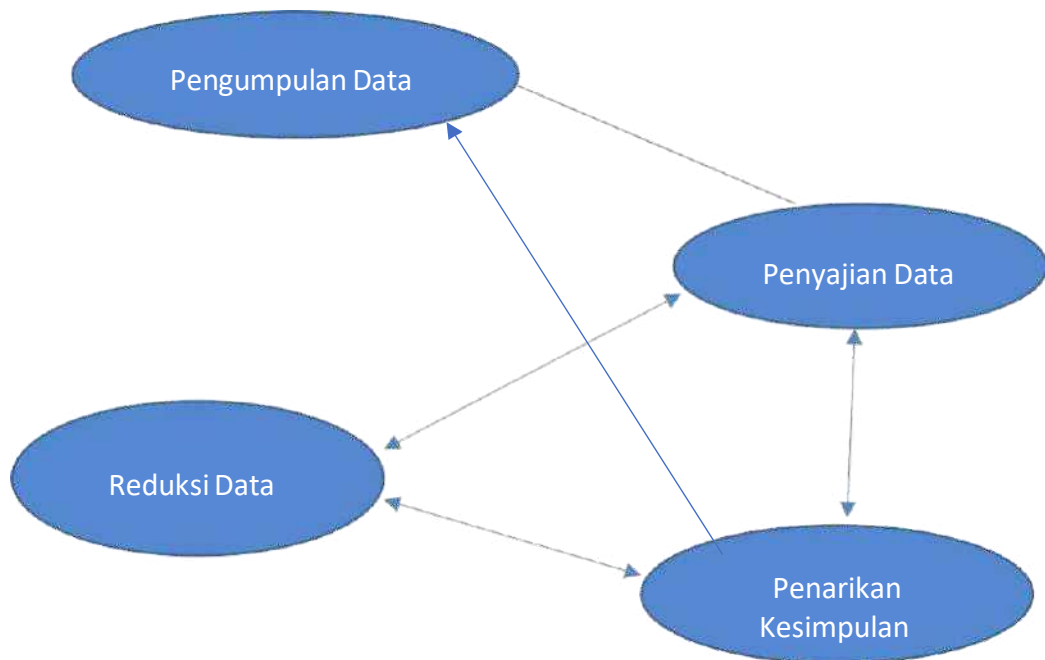
Analisis data menurut Sugiyono (2014:244) mengartikan yaitu proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan dari hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi. Bogdan dan Tailor, sebagaimana dikutip oleh Moleong, yang

menyatakan bahwa metode kualitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012)”.

Dalam menganalisis data penelitian ini mengacu pada teknik Analisa data kualitatif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang meliputi *data collection*, *data display*, *data reduction*, *conclusion (drawing/verifyin)*

**Gambar 3. Analisa Data Model Interaktif**



Sumber : Miles dan Huberman (1992)

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

Dalam upaya pencapaian *SDGs* Desa khususnya tujuan yang mewujudkan pendidikan desa berkualitas, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja tentang afirmasi pelaksanaan pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), tenaga pendamping profesional (pendamping desa) berbasis Rekognisi Pembelajaran Lampau juga program merdeka belajar. Sebagai aksi nyata, maka tahun 2022 diimplementasikannya pengembangan pilot program RPL DESA dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Universitas Negeri Surabaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya yang berdiri sejak 19 Desember 1964. Unesa telah memiliki tujuh fakultas yang terletak di lokasi yang berbeda. Sejumlah empat fakultas berlokasi di Kampus Ketintang yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sedangkan tiga fakultas lainnya berada di Kampus Lidah Wetan yaitu Fkaultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Bahasa dan Seni.

Pada tahun 1964 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum didirikan dengan nama Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial (FPIPS). Saat ini memiliki enam jurusan dan delapan program studi yaitu: Jurusan Administrasi Publik dengan Prodi S1 Ilmu Administrasi Publik; Jurusan Geografi dengan prodi S1 Pendidikan Geografi dan S1 Pendidikan IPS; Jurusan Ilmu Sosial dengan Prodi S1 Ilmu Sosiologi dan Ilmu Komunikasi; Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan Negara; dan Jurusan Sejarah dengan Prodi S1 Pendidikan Sejarah. Total tenaga dosen yang ada di FISH Unesa adalah 112 tenaga dosen yang ada pada delapan program studi. Selain itu demi kelancaran proses kegiatan di FISH Unesa, terdapat 38 tenaga kependidikan. Tendik tersebut ditugaskan untuk mengurus operasional di masing-masing jurusan dan ada yang bertugas untuk mengurus operasional di tingkat fakultas. Salah satu fakultas yang mengimplementasikan program RPL adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum pada

Prodi S1 Ilmu Sosiologi dan Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Calon mahasiswa terbanyak berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum terlebih pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara yang dibuktikan dengan penuhnya mahasiswa yang ada di dalam ruang kelas. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti. Maka dapat dilakukan pengkajian terkait Implementasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Untuk Mencapai SDGs Desa (Studi pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH Unesa) melalui uraian fokus penelitian di bawah ini.

## **1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Standar dan tujuan harus telah ditentukan pada sebuah kebijakan yang kemudian untuk dilaksanakan oleh pelaksana. Berdasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dinyatakan bahwa setiap negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah berkewajiban mengembangkan sistem pendidikan nasional dan seluruh warga negara mendapatkan pendidikan. Dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan manusia yang menjunjung tinggi tata nilai agama dan persatuan bangsa. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Kemudian didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Pada tahun 2021, sebanyak 45.387 kepala desa, 43.876 sekretaris desa, 31.147 pengurus BUM Desa, dan 7.889 tenaga pendamping profesional adalah lulusan SMA/ sederajat. Sebanyak 20.450 kepala desa, 25.721 sekretaris desa, 15.477 pengurus BUMDes, dan 23.735 tenaga pendamping profesional lulusan S1/D4. Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tahun 2021 mengadakan program bantuan pemerintah penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2.

Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Program ini didasari oleh dasar hukum dari Peraturan Menteri Riset Dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2016 mengenai Pedoman RPL pada beberapa landasan hukum seperti UU tentang Sisdiknas No. 20 Tahun

2013, Perpres, dan PP No. 4 Tahun 2014.

Dengan diadakannya program ini diharapkan bagi individu yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan (diploma, sarjana, magister) dan sudah bekerja dapat melanjutkan pendidikan dan terdorong untuk terus belajar melalui pendidikan formal di jenjang pendidikan tinggi. Pendapat yang sesuai dengan pernyataan di atas dikemukakan oleh Bapak Agus, Kades Desa Bakulan mengemukakan:

“Sebagai Kades, saya juga ikut serta untuk mendorong agar terlaksana pembelajaran yang maksimal agar manfaat ke depan dapat dimanfaatkan oleh Desa dengan kapasitas yang meningkat. Menurut pantauan, antusias peserta sangat luar biasa disebabkan karena niat awal kami adalah untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi dalam pemberian pelayanan.”

Pada program Rekognisi Pembelajaran Lampau ini dapat diakui sebagai capaian pembelajaran dalam bentuk perolehan SKS untuk menempuh jenjang S1 atau S2. Namun untuk saat ini program RPL yang dilaksanakan adalah pada jenjang S1. Untuk sarjana dapat berasal dari lulusan SMA atau sederajat atau pernah kuliah dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun atau setidaknya memiliki sertifikasi pelatihan yang jelas. Sedangkan untuk program S2 yang pernah kuliah magister dan belum dilanjutkan atau memiliki pengalaman kerja atau memiliki pelatihan bersertifikat maka mendapat bantuan 1 semester.

Dalam upaya untuk merelaisikannya telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama pada tanggal 20 Februari 2021 di Jakarta. Dalam program ini dilakukan kerjasama oleh banyak perguruan tinggi, tidak hanya perguruan tinggi negeri saja tetapi juga perguruan tinggi swasta yang diwadahi ke dalam Forum Perguruan Tinggi Desa (PERTIDES). Forum PERTIDES berkomitmen untuk mendukung pembangunan desa dan perdesaan melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Forum PERTIDES berkomitmen dan sangat mendukung pelaksanaan Program RPL Desa serta akan mengembangkan program pendidikan di lingkungan masing-masing. Hingga saat ini, sebanyak 13 PTN/PTS telah mengembangkan program RPL untuk jenjang S1 dan S2. Harapannya, Program RPL Desa dapat menjadi ajang bagi seluruh *stakeholder* dan elemen pembangunan berpartisipasi dan berperan serta dalam peningkatan kualitas masyarakat desa dan perdesaan melalui berbagai bentuk formula dukungan pendidikan untuk masyarakat desa.

Sebagai tindak lanjut disusun juga dokumen Panduan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa yang diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 122 Tahun 2021 yang memuat beberapa aspek terkait mekanisme, tata cara, dan prosedur teknis dan administratif pengelolaan Program RPL Desa mulai dari proses rekrutmen, asesmen,

proses pembelajaran, penilaian, dan kelulusan. Seperti tujuan pada dasar negara, program RPL ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengelola BUMDes, Tenaga Pendamping Profesional, serta Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menempuh pendidikan tinggi melalui jalur RPL. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Deni sebagai Kasi Pemerintahan Desa Clebung mengatakan :

“Sebagai Kasi Pemerintahan Desa, saya menjadi mengerti mengenai implementasi yang sesuai dengan teori itu seperti apa, begitu juga dengan antusiasme dari peserta pada mata kuliah lain dengan cara kami beberapa peserta merencanakan agenda untuk membahas mengenai program RPL (tugas).”

## 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumber daya manusia dan sumber dayanon manusia. Sumber daya manusia dalam program RPL ini terdiri atas keterlibatan pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki nilai penting dalam pembangunan desa. Maka, untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, perlu dilakukan rekognisi pembelajaran lampau terhadap pengalaman kerja di desa menjadi kredit matakuliah untuk menempuh pendidikan lanjut pada jenjang S1/D4 dan S2. Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara beserta penyandang dana beasiswa melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) melalui program *pilotting* oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menyediakan Uang Kuliah Tunggal bagi sekitar 1600 peserta RPL Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, pengelola BUM Des/BUM Desma, Tenaga Pendamping (TPP), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), dan pegiat lainnya yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyediakan Uang Kuliah Tunggal bagi paramahasiswa yang lolos melalui sumber dana yang ada di Kabupaten Bojonegoro berupa APBD.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, mengamanatkan penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dalam rangka

*Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa yaitu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya.

Untuk mewujudkan tujuan dari SDGs Desa tersebut maka pada tahun 2022 Program RPL Desa di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang bekerja bersama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Untuk mencapai tujuan bersama perlu kerjasama yang baik juga antara Kementerian Desa yang diwakili oleh kepala badan yang ada di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Perguruan Tinggi Penyelenggara yang terdiri dari Rektor Universitas, Wakil Rektor, Kaprodi, hingga dosen-dosen prodi yang langsung turun lapangan untuk mengajar para mahasiswa, beserta penyandang dana beasiswa. Namun tidak semua prodi cocok untuk program RPL ini.

Maka dari itu dilakukannya pemilihan prodi yang sesuai dengan tujuan dari program RPL maka terpilih lima prodi S1 yang sesuai yaitu, Ilmu Administrasi Negara, Manajemen, Akuntan, Sosiologi, dan Pendidikan Luar Sekolah. Program RPL ini dapat ditempuh selama 2 tahun melalui proses rekognisi atas keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya sendiri salah satu prodi yang paling banyak diminati di Unesa yaitu S1 Ilmu Administrasi Negara yang terdiri atas 6 kelas. Menurut Ibu Tjitjik Rahaju, seorang dosen yang juga Kaprodi S1 Ilmu Administrasi Negara mengatakan:

“Dalam satu kelas ini terdiri dari beberapa desa, ini terjadi karena saat pendaftaran oleh masing-masing desa diberi kuota agar tidak masuk ke prodi atau universitas yang sama. Misalnya, dalam satu angkatan ini satu desa hanya diberi kuota 2 orang saja. Karena peminat di prodi ini dan jumlah desa di Bojonegoro juga yang cukup banyak”.

Selain dibutuhkannya kerjasama juga dibutuhkan faktor penunjang lain seperti sarana dan prasarana yang ada di Unesa. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus yang menyediakan sarana dan prasarana secara luring maupun daring.

Menurut Ibu Wiwik Sri Utami selaku Wakil Dekan Bidang Akademik FISH mengatakan :

“Secara sarana dan prasarana kami telah menyediakan ruang kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, internet yang memadai ketika luring, selain itu seperti perizinan dan kemudahan akses baik bagi mahasiswa maupun dosen seperti administrasi, penugasan, persuratan yang legal dan resmi sehingga bisa dilakukan dengan mudah agar pelaksanaan dan tujuan dari adanya program RPL ini”.

Tidak terlepas dari pihak universitas saja, Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro



juga telah melengkapi sarana dan prasarana. Fasilitas yang ada di kantor desa misalnya laptop maupun internet. Pada salah satu desa menerapkan kebijakan dengan peminjaman laptop kepada anggota perangkat desa yang mengikuti perkuliahan RPL. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus, seorang peserta program RPL yang juga merupakan seorang Kepala Desa Bakulan, Kecamatan Temayang mengatakan:

“Untuk sarana dan prasarana yang ada di kantor desa juga dilengkapi seperti laptop maupun internet. Laptop ini memang difasilitasi khusus untuk program RPL. Di desa Bakulan ada 6 peserta di lembaga yang berbeda BPD, Ketua BUMDes, dan perangkat desa jadi masing-masing peserta mendapatkan fasilitas peminjaman laptop. Kalau internet sudah difasilitasi oleh desa sebelum ada program RPL.”

Jika dilihat dari pernyataan oleh beberapa narasumber dapat dibuktikan bahwa implementasi program RPL selama ini sudah beradaptasi dengan baik oleh para implementor.

### **3. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi**

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974), kejelasan standar dan tujuan serta ketepatan dan konsistensi dalam komunikasi standar dan tujuan tersebut menentukan implementasi kebijakan yang efektif. Salah satu kekhasan SDGs adalah memiliki rumusan yang berupa pernyataan tujuan, artinya indikator yang disusun dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang merujuk pada sasaran perorangan. Target SDGs selalu bertujuan pada pemenuhan 100 persen warga yang dapat dilihat pada tujuan nomor 4 tentang pendidikan bermutu. Tujuan yang berkaitan dengan kawasan diarahkan pada indikator keberadaan fasilitas penggunaan yang berkualitas, serta pengelolaan dampaknya bagi ekosistem setempat.

Tujuan-tujuan itu juga mencakup strategi bahkan mencakup kelembagaan yang dibutuhkan. Sejalan dengan peningkatan pengetahuan tentang ragam dan sifat pihak-pihak pemangku kepentingan, maka kerja sama juga mencakup setidaknya pihak masyarakat, negara, dan swasta. SDGs dibutuhkan untuk diimplementasikan ke desa. Dengan cara membangun desa dengan substansi yang total, namun dapat dikendalikan pada wilayah dan warga yang terbatas. Artinya, peluang keberhasilan penerapan SDGs pada satu desa, pada masing-masing desa, menjadi maksimal. SDGs ditempatkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi tidak dilakukan secara tiba-tiba. Melainkan dilakukan diskusi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama dengan Perguruan

Tinggi Penyelenggara, serta perangkat desa yang terlibat dalam program ini maka menghasilkan sebuah produk berupa Panduan Program Sarjana Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Tahun Ajaran 2022-2024. Di dalam buku panduan berisikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan Program RPL, mata kuliah dan SKS pada prodi yang ditentukan dan juga terdapat jadwal pelaksanaan yang dimulai dari dilakukannya pendaftaran. Regulasi tahunan tersebut digunakan sebagai basis penyusunan kegiatan dan penganggaran tahunan pada masing-masing desa. Kondisi, potensi dan permasalahan masing-masing desa telah disusun pada awal tahun serta didokumentasikan bagi publik melalui situs *kemendesa.go.id* yang digunakan sebagai titik tolak penyusunan kegiatan dan penganggarnya yang dapat diputuskan melalui musyawarah desa.

**Gambar 4. Buku Panduan Program Sarjana  
Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) 2022-2024**



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022

Maka setelah itu pendaftaran program RPL dibuka dengan jadwal sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jadwal Pendaftaran Program RPL di UNY dan UNESA**

No.	Kegiatan	Lama	Waktu
1	Sosialisasi dan Bimtek Pendaftaran	3 hari	18-21 Februari 2022
2	Pendaftaran mahasiswa RPL	3 hari	21 Februari-2 Maret 2022
3	Pengumpulan dan unggah portofolio	7 hari	18 Februari-2 Maret 2022
4	Evaluasi Diri Calon Mahasiswa	7 hari	18 Februari-2 Maret 2022
5	Penilaian portofolio peserta RPL	11 hari	3-12 Maret 2022
6	Wawancara calon mahasiswa RPL (jika diperlukan)	2 hari	13-14 Maret 2022
7	Sidang asesor calon mahasiswa RPL	2 hari	15-16 Maret 2022
8	Penetapan hasil seleksi	1 hari	17 Maret 2022
9	Pengumuman seleksi mahasiswa RPL	1 hari	18 Maret 2022
10	Pengumuman beasiswa RPL Desa Bojonegoro	1 hari	19 Maret 2022

Sumber : Buku Panduan RPL Desa (2022)

Saat mendaftar tentu saja berbeda dengan mahasiswa reguler, dalam pelaksanaannya ada hal yang perlu di rekognisi seperti SK yang selama ini dilakukan oleh para peserta selama bekerja. Dari SK yang mereka miliki kemudian akan dinilai oleh prodi dan dikonversikan dengan mata kuliah yang sesuai. Pada program ini akan mendapatkan gelar S.Sos dan diharapkan dapat bekerja sebagai Administrator, Analis Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Analis Kebijakan, Fasilitator Pemberdayaan, dan Wirausaha.

Bobot SKS yang ditempuh selama perkuliahan studi S1 yaitu sebanyak 144 SKS sedangkan Mata Kuliah yang dapat ditempuh dibagi menjadi Mata Kuliah Potensi Rekognisi sebanyak 72 SKS dan Mata Kuliah yang wajib ditempuh sebanyak 72 SKS. Lalu selanjutnya, Mata Kuliah Wajib yang dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester 1 (satu) sebanyak 20 SKS. Adapun matakuliah yang diampu yaitu: Pengantar Administrasi Publik, Azas-Azas Manajemen, Teori Organisasi, Sistem Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Hukum Administrasi Negara, Reformasi Administrasi Negara.

Memasuki semester 2 (dua) sebanyak 22 SKS. Adapun matakuliah yang diambil yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Perilaku Organisasi, Manajemen

Pelayanan Publik, Governansi Digital, Keuangan Negara, Metode Penelitian Administrasi, Statistik Sosial. Semester 3 (tiga) sebanyak 18 SKS yaitu matakuliah Analisis Kebijakan, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, Birokrasi Dan Governansi Publik, Etika Administrasi Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Seminar Administrasi Negara, Evaluasi Kebijakan, semester 4 (empat) sebanyak 12 SKS yaitu Kebijakan Lingkungan Hidup, Manajemen Bencana, Kerjasama Antar Daerah, Skripsi.

Saat pendaftaran RPL, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara diikuti oleh 325 pendaftar. Setelah itu dilakukan rekognisi terhadap kegiatan yang mereka ikuti dengan bukti ijazah sekolah, SK perangkat desa, sertifikat pelatihan yang mereka ikuti. Rekognisi dilakukan dengan 1 mahasiswa di nilai atau asesori dengan 3 asesori. Asesori rekognisi ini dilakukan melalui sistem yang dibuat oleh PPTI. Hasil asesori rekognisi lolos penilaian sejumlah 295 calon mahasiswa.

Dalam berjalannya waktu, dari 295 mahasiswa RPL yang lulus penilaian, karena berbagai hal, maka akhirnya mahasiswa RPL Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara yang aktif (melakukan KRS di sistem akademik Unesa/siakadu) adalah sejumlah 282 orang terbagi dalam 6 kelas yaitu kelas C, D, E, F, G dan H. Pembagian kelas tersebut didasarkan pada domisili mahasiswa yang secara geografis berdekatan. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan antar mahasiswa dalam melakukan koordinasi dan komunikasi terkait proses perkuliahan. Berikut gambar peta sebaran pembagian kelas Program RPL Desa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara:

**Gambar 5**  
**Peta Pembagian Kelas RPL Desa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara**



Sumber: Dokumen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Unesa, 2022

Pada semester 1 jadwal perkuliahan kelas RPL dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu. Hal ini dilakukan mengingat para perangkat desa bekerja saat hari kerja. Sehingga agar tidak mengganggu jam kerja, maka Prodi mengambil kebijakan perkuliahan dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu. Tetapi berdasar hasil evaluasi terlalu berat bagi mahasiswa dan dosen untuk menerima perkuliahan dan mengajar mulai pagi jam 07.00 sampai berakhir pada jam 18.00 WIB. Sehingga pada semester 2 jadwal perkuliahan berganti menjadi jam 15.30 WIB pada saat jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu tjik Rahaju sebagai berikut :

“karena yang diterima di Prodi AN ada sekitar 286 mahasiswa, sehingga kami bagi dalam 6 kelas. Dan perkuliahan untuk semester satu kali lakukan pada hari Jumat dan Sabtu. Memasuki semester 2, kami evaluasi karena terlalu berat bagi mahasiswa dan juga dosen mengajar dalam satu hari mulai jam 07.00 sampai pukul 18.00 WIB. Sehingga untuk semester 2, jadwal dibuat mulai sore jam 15.30 saat jam kerja.”

Dalam hal komunikasi antar organisasi bisa dilihat pada Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi memiliki website khusus yang berisi mengenai panduan untuk pelaksanaan program RPL yang diberi nama *SIERRA* (Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Akademik. Menurut Ibu Tjitjik Rahaju mengatakan,

“Koordinasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi juga dapat dilihat dari penambahan *platform* khusus di *SIKAD* yang diberinama *SIMRPL*. Setelah dilakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal diatas. Maka, dilakukan pengumuman oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke seluruh desa dengan dibatasi kuota tertentu. Program RPL ini sangat sesuai dengan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilakukan oleh pihak UNESA salah satunya yaitu kerjasama antara prodi, fakultas, universitas, maupun di luar lingkup UNESA.”

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ibu Wiwik Sri Utami mengenai komunikasi mengatakan sebagai berikut :

“Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya sebuah *FGD* antara UNESA, Kabupaten, Kemendes. Pada awalnya sempat terjadi kendala karena faktor gagap teknologi karena kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring sehingga situasi maupun kondisi masih belum kondusif. Namun kondisi tersebut dapat berubah seiringnya terbiasa menggunakan *video conference*.”

Saat pelaksanaan perkuliahan diawali dengan adanya acara pembukaan yang

dihadiri oleh para implementor. Saat pembukaan mereka ditempatkan di Lantai 9 Gedung LP3 Unesa untuk mendapatkan pengarahan dari Dekan FISH dan juga dari Ketua Jurusan Administrasi Publik dilanjutkan dengan acara perkenalan dengan dosen-dosen yang ada di Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Tujuannya agar para mahasiswa dapat mengenal siapa pimpinan yang ada di FISH serta mengenal dosen-dosen yang nantinya akan mengajar. Selanjutnya mahasiswa mengikuti perkuliahan perdana di Gedung Graha Unesa. Saat pembukaan kegiatan RPL sekaligus perkuliahan perdana juga dihadiri oleh Kementerian Desa yang diwakili oleh kepala badan yang ada di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Perguruan Tinggi Penyelenggara, Rektor Universitas, Wakil Rektor, Kaprodi, hingga dosen-dosen prodi. Hal ini seperti yang disampaikan menurut Ibu Tjitjik Rahaju yang juga menghadiri acara pembukaan tersebut mengatakan:

“Acara pembukaan ini dilaksanakan di dua universitas yang menyelenggarakan yaitu pembukaan pertama di UNY yang juga dihadiri oleh Kementerian Desa yang diwakili oleh kepala badan yang ada di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Perguruan Tinggi Penyelenggara, Rektor Universitas, Wakil Rektor, Kaprodi, hingga dosen-dosen prodi yang langsung turun lapangan untuk mengajar para mahasiswa, beserta penyandang dana beasiswa”.

Berikut dokumentasi perkuliahan perdana kelas RPL Desa Tahun 2022 di Gedung Graha Unesa pada Rabu, 30 Maret 2022:

**Gambar 6**  
**Perkuliahan Perdana Mahasiswa Program RPL Desa Tahun 2022**





Sumber: Dokumentasi Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Unesa, 2022

Seperti juga yang disampaikan salah satu dosen yang ada di Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara bernama Galih Wahyu Pradana, mengatakan:

“Perkuliahan RPL untuk kuliah perdana dilakukan secara *offline*. Mahasiswa datang ke Kampus Unesa untuk mengikuti kuliah perdana. Sebelumnya mereka mendapat pengarahan dari Dekan FISH dan Kajar Administrasi Publik, baru setelah itu mereka melakukan perkenalan dengan dosen-dosen yang ada di Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Baru setelah makan siang mereka mendapat kuliah perdana di Gedung Graha Unesa”

Berikut dokumentasi pengarahan umum dari pengarahan dari Dekan FISH dan Kajar Administrasi Publik Unesa untuk mahasiswa RPL Desa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara di Lantai 9 Gedung LP3 Unesa pada Rabu, 30 Maret 2022:

**Gambar 7**  
**Pengarahan Untuk Mahasiswa RPL Desa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara**





Sumber: Dokumentasi Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Unesa, 2022

#### **4. Karakteristik Dari Agen Pelaksana**

SDGs Desa pada nomor 18 diputuskan oleh negara, yang diawali Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. SDGs Desa nomor 18 telah tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Artinya, keputusan ini legal dan mengikat bagi 74.953 desa di Indonesia untuk mengimplementasikannya pada tahun 2021. SDGs Desa merupakan kebijakan untuk segera dilaksanakan di lapangan, agar segera keluar hasil dan manfaatnya bagi warga desa. Permendesa PDFTT No. 13/2020 menunjukkan legalitas keputusan dan penerapannya sudah dimulai dengan disusunnya perencanaan di seluruh desa di Indonesia pada tahun 2020. Adapun implementasi dokumen perencanaan yang meliputi SDGs Desa nomor 18 untuk segera dijalankan mulai Januari 2020.

SDGs Desa dipilih sebagai strategi mempercepat bergulirnya roda pembangunan desa itu sendiri. Implementasi SDGs tersebut dapat dilihat dari karakteristik agen pelaksana yang saling berkontribusi untuk mencapai tujuan. Agen pelaksana dari pihak kampus seperti dosen melakukan kewajibannya dengan memberikan perkuliahan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang diberikan.

Tidak bisa dipungkiri dengan adanya kelas RPL sejumlah 6 kelas, tentu menambah beban tugas mengajar bagi para dosen di prodi. Bisa dikatakan perbandingan jam kerja yang dilakukan cukup melebihi kapasitas jam kerja daripada biasanya. Karena di Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara mahasiswa reguler sudah cukup banyak dan ditambah mahasiswa program RPL. Namun hal tersebut dapat ditangani oleh para agen pelaksana kampus dengan baik. Dapat dibuktikan saat perkuliahan dimulai para mahasiswa diajarkan secara teori,

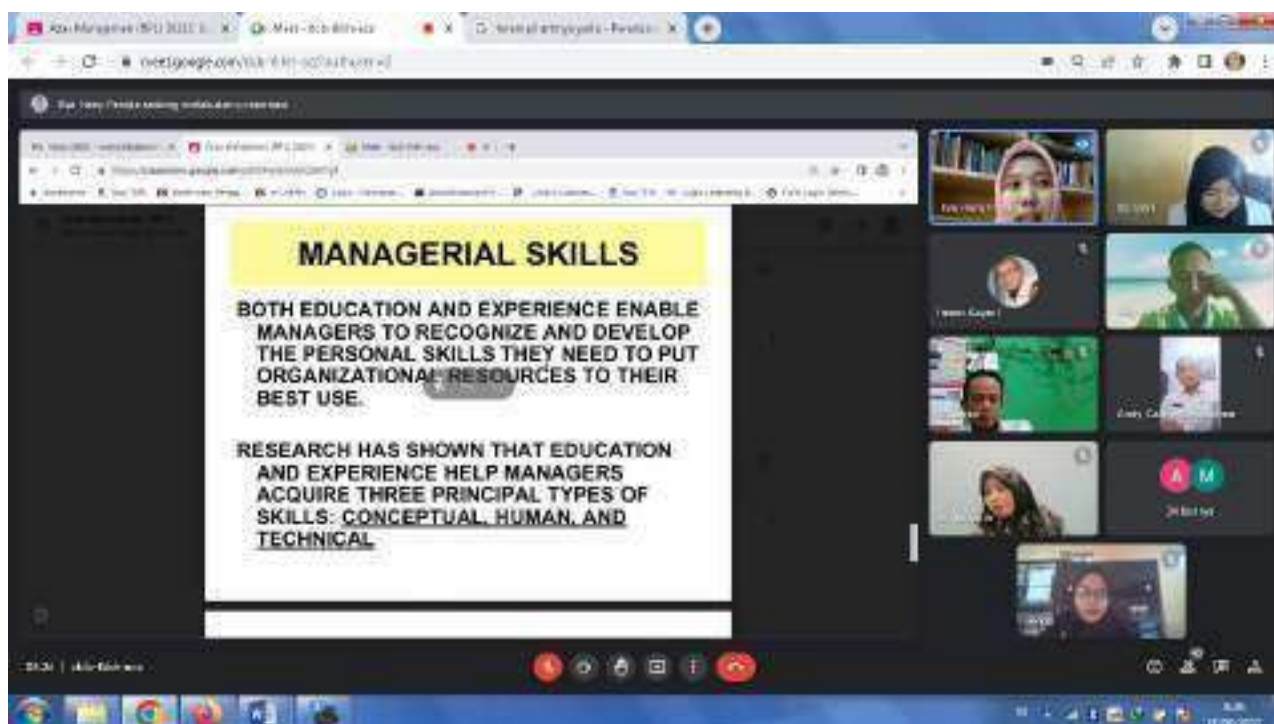


secara implementasi dan membahas kendala yang sering muncul ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diskusi dan perkuliahan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik karena adanya tanggapan aktif dan terinspirasi dari para mahasiswa yang menceritakan inovasi dan program maupun pengalaman di masing-masing desa para peserta program RPL bekerja. Program ini sangat bermanfaat karena bagi para mahasiswa mendapatkan ilmu baru secara langsung dan tidak langsung. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Eva Hany Fanida sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Publik :

“Dengan adanya tambahan 6 kelas ini otomatis menambah SKS dosen dalam melaksanakan perkuliahan. Dosen diberi tambahan tanggung jawab dengan mengajar pada kelas RPL. Memang awalnya agak berat, tetapi sekarang kami sebagai dosen sudah menemukan polanya, sehingga kami bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik”.

Berikut contoh pelaksanaan kuliah daring mahasiswa program RPL Desa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara:

**Gambar 8**  
**Kuliah Daring Mahasiswa Program RPL Desa**  
**Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara**



Sumber: Dokumentasi Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Unesa, 2022

Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Pak Agus Utomo selaku Kades Desa Bakulan , mengatakan

“Karena saat di kelas cukup aktif ketika berdiskusi ini memberikan dampak positif secara langsung ketika menghadapi masyarakat. Biasanya kami yang pasif kepada masyarakat, saat ini kami bisa menjelaskan kepada masyarakat dan lebih terbuka lagi mengenai hal-hal apa saja yang

ditanyakan oleh masyarakat. Kami juga menjadi lebih aktif untuk mengadakan sosialisasi mengenai program-program yang ada. Biasanya masyarakat yang hanya tahu bentuk secara fisik karena adanya infrastruktur baru. Tetapi untuk saat ini masyarakat juga bisa ikut mengawasi hal-hal yang dilakukan oleh perangkat desa.”

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Deni seorang Kasi Pemerintahan Desa Clebung mengatakan,

“Program RPL ini saling memberikan manfaat antara perguruan tinggi pelaksana dan para perangkat desa yang mengikuti program ini. Adanya tukar pendapat dan diskusi mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman baru antara satu sama lain. Kami sangat merasakan manfaat yang bisa diterima dengan mengikuti perkuliahan RPL. Kami menjadi lebih percaya diri dalam mengeluarkan pendapat saat rapat dikantor ”

## **5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Salah satu hal penting implementasi SDGs Desa adalah kelembagaan yang dinamis, bersedia mengikuti data terbaru, sehingga lincah menyusun kebijakan sesuai data. Di desa, kelembagaan pemerintah desa berperan sangat penting. Kepala desa dan perangkatnya mengemban beragam fungsi untuk menjaga ketentraman warga di tengah perubahan yang terjadi di desa (Breman dan Wiradi, 2004). Pada saat yang sama mereka menjadi pemimpin yang legitimasinya justru terjaga melalui layanannya kepada warga (Geertz, 1986). Ketika warga puas atas layanannya, maka legitimasi mereka meningkat. Demikianlah, akhirnya terbuka peran pemerintah desa untuk memberdayakan warganya (Supriatna, 1997). Dalam rangka memperkuat kelembagaan desa, maka Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Unesa bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kegiatan *Workshop* yang berjudul “Kolaborasi Penguatan Kelembagaan Desa dalam Rangka Percepatan Pencapaian SDGs Desa di Kabupaten Bojonegoro”. Kegiatan *workshop* tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 1 November 2022 di Aula Rekrorat Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro dengan mengundang perwakilan DPMD Kabupaten Bojonegoro, dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, dan 250 perwakilan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro yang perangkat desanya menjadi mahasiswa Program RPL Desa di Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara.

*Tujuan* dilakukannya *Workshop* “Kolaborasi Penguatan Kelembagaan Desa dalam Rangka Percepatan Pencapaian SDGs Desa di Kabupaten Bojonegoro” adalah untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro tentang pentingnya SDGs dan pencapaian SDGs dalam rangka melaksanakan pembangunan

berkelanjutan di tingkat desa. SDGs desa digagas oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memberikan panduan kepada perangkat desa di Indonesia agar pembangunan di desa menjadi lebih terarah. Narasumber pada kegiatan kali ini adalah Evie Oktavia Marini, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dan Muhammad Imam Affan T.STP, M.H. Adapun gambaran pelaksanaan workshop tersebut sebagai berikut:

**Gambar 9**  
**Workshop Kolaborasi Penguatan Kelembagaan Desa dalam Rangka Percepatan Pencapaian SDGs Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022**



Sumber: Dokumentasi Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Unesa, 2022

Disisi lain, pengambilan keputusan bersama tertinggi adalah keputusan yang dilakukan dari hasil musyawarah desa. Musyawarah desa menjadi titik kritis untuk menggalang

perubahan, termasuk berupa pembangunan desa untuk memahami hal-hal baru yang tercantum dalam *item-item* ide, konsep, hingga indikator pembangunan dari luar desa. Berbagai lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di desa mencerminkan kebutuhan warga desa karena turut membahas desain pembangunan secara aktif. Setelah ide kemajuan disepakati, disusunlah rencana pembangunan jangka menengah maupun tahunan. Sesuai regulasi, perencanaan yang disusun harus merujuk pada data desa terbaru. Proses perencanaan pembangunan desa lazim dimulai dengan identifikasi kekurangan layanan, fasilitas, dan komponen kemajuan desa. Musyawarah desa memutuskan untuk memenuhi aspek-aspek yang masih belum terwujud di desa. Untuk menjaga ketahanan ekonomi desa dapat dilakukan dengan cara melakukan pengembangan bumdes.

BUMDes dapat diarahkan untuk mendukung usaha ekonomi warga yang sudah berkembang di desa, agar berkembang lebih pesat lagi. Menurut berita dari *Bojonegorokab.go.id* hampir semua desa di Kabupaten Bojonegoro telah memiliki BUMDes yang sudah berbadan hukum. Dari 419 Desa hanya 26 desa saja yang belum memiliki BUMDes. Diantara desa-desa yang memiliki BUMDes terbagi menjadi 4 kategori yaitu kategori maju 15 desa, kategori berkembang ada 64 desa, kategori tumbuh 173 desa, dan kategori dasar ada 161 BUMDes.

Sebagian keuntungan BUMDes diharuskan menjadi komponen Pendapatan Asli Desa (PADes) tercatat dalam APBDes, maka penggunaannya bisa untuk pembangunan desa. Selain itu, PADes dapat digunakan untuk meningkatkan aset desa. Aset yang produktif yang selanjutnya menjadi sumber PADes lebih besar yang diharapkan dapat meluaskan layanan kepada warga desa. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan SDGs Desa yaitu dengan cara pelatihan. Dalam program RPL dilakukan pelatihan secara teori mengenai pelayanan yang baik. RPL memberikan hasil yang positif bagi warga dan perangkat desa. Hal ini dapat dilihat dari program RPL mampu mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan politik karena wawasan yang dimiliki oleh para perangkat desa yang mengikuti program RPL.

Antusiasme program ini bukan hanya dirasakan oleh para perangkat desa yang mengikuti program ini. Tetapi juga dirasakan oleh warga desa. Warga desa memiliki harapan lebih terhadap program RPL yang dilaksanakan. Menurut Bapak Agus Utomo selaku Kepala Desa Bakulan mengatakan bahwa :

“Perkembangan yang dirasakan oleh warga desa bukan hanyaperkembangan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur yang terlihat saja. Tetapi juga mengenai pelayanan yang juga lebih mudah dipahami oleh warga.

## 6. Disposisi Dari Pelaksana

SDGs Desa merupakan upaya alternatif aksi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa. Di tingkat nasional, menjadikan SDGs Desa sebagai tujuan dengan indikator-indikator dalam pelaksanaan pembangunan desa akan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs mendukung dan mempercepat pencapaian Perpres Nomor 59/2017 yang merupakan tindak lanjut kesepakatan pemerintah Indonesia terhadap dokumen pembangunan global yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, serta dokumen agenda pembangunan global yang memuat 17 tujuan, 169 target, yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Pembinaan dan pengawasan merupakan langkah penting mengawal implementasi SDGs Desa yang mencakup kegiatan pengembangan kapasitas, pelatihan, asistensi teknis, dan pendampingan. Fasilitas tidak cukup jika hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga perlu didukung pegiat desa lainnya, seperti tokoh desa, LSM, perguruan tinggi, lembaga-lembaga internasional, bahkan dunia usaha. Pendampingan penting dilakukan secara berkelanjutan dan secara emansipatif oleh aktor-aktor lokal, sebagai upaya kaderisasi untuk menjaga laju pembangunan desa. Kekuatan inisiatif dan inovasi kader-kader lokal menjadi modal budaya bagi desa di masa depan. Pembangunan desa menitikberatkan pada kekuatan inisiatif lokal lebih mungkin menuai kesuksesan, karena didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan akan kebutuhan masyarakat setempat. Dari banyak *best practice* dan *lesson learned* tentang pembangunan desa, faktor utama keberhasilannya ditentukan dari kolaborasi.

Kemajuan dan capaian desa-desa tidak lepas dari dukungan kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak. Artinya, pencapaian SDGs Desa akan sangat bergantung dari komitmen kuat dan sinergi dari semua pihak. Kabupaten Bojonegoro sangat mendukung program RPL ini dan dapat dilihat dari izin yang diberikan oleh kepala desa kepada para pegawai yang akan mendaftar program ini. Selain itu, jadwal perkuliahan yang bentrok dengan jadwal kerja, pegawai diberikan izin untuk mengikuti perkuliahan di jam kerja mereka. Sama halnya yang dikatakan oleh Pak Agus Utomo, menjelaskan:

“Di desa tempat saya bekerja tidak ada disposisi khusus hal ini dikarenakan memang sudah sejak awal ada skema. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan karena sebuah alasan tertentu. Para perangkat daerah yang mengikuti program ini juga diberikan izin sesuai kebutuhannya”.

Begitu juga hal yang diungkapkan oleh Bu Wiwik Sri Utami mengatakan:

“Sarana dan prasarana yang tersedia memang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, jadi kalau ada ruangan yang ingin digunakan maka surat maupun perizinan akah diberikan akses yang mudah. Untuk disposisi dilakukan secara langsung kepada dosen prodi melalui dekan masing-masing fakultas”.

Disposisi dari agen pelaksana merupakan bukan hal yang berat untuk dilakukan. Dapat dilihat bahwa kerja sama yang dibangun oleh para agen pelaksana telah membuktikan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi para agen pelaksana.

Sebagai upaya menjaga kualitas program kerja sama perkuliahan RPL Desa, pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan disposisi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan koordinasi teknis kepada pihak kampus (Unesa dan UNY) terkait penyelenggaraan perkuliahan Program RPL Desa. Menindaklanjuti hal tersebut, Unesa secara pro aktif juga berupaya menjaga kualitas perkuliahan Program RPL Desa dengan cara melakukan monev perkuliahan yang dijadwalkan per semester. Monev perkuliahan tersebut dilakukan oleh Gugus Penjamin Mutu (GPM) di fakultas masing-masing, termasuk monev perkuliahan Program RPL Desa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara yang dilakukan oleh GPM Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Disamping itu, monev lapangan Program RPL Desa juga dilakukan oleh pihak LP3 Unesa selaku koordinator Program RPL Desa di Unesa. Monev lapangan ini dijadwalkan pada Sabtu, di Kantor DPMD Kabupaten Bojonegoro yang dihadiri oleh perwakilan LP3 Unesa, perwakilan prodi program RPL Desa, perwakilan DPMD Kabupaten Bojonegoro dan perwakilan penanggung jawab kelas dari semua prodi di Unesa. Dalam monev lapangan tersebut dibahas beberapa hal diantaranya tentang kendala dan masukan dari mahasiswa RPL selama perkuliahan berlangsung. Berikut gambar kegiatan monev di DPMD Bojonegoro yang dilaksanakan pada Sabtu, 3 Desember 2022 sebagai berikut:

**Gambar 10**  
**Money Lapangan Program RPL Desa Unesa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022**



Sumber: Dokumentasi Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Unesa, 2022

## **B. PEMBAHASAN**

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan Pemerintah Kabupaten yang cukup sukses dalam mengatur perekonomisan yang ada di 419 desa didalamnya. hal ini dapat dilihat dari banyaknya BUMDes yang mampu dikelola hingga menjadi berbadan hukum. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya tersebut juga menjadi aset yang produktif sehingga menjadi PADes yang lebih besar. Implementasi merupakan pelaksanaan sebuah program yang telah disusun atau dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan. Implementasi program dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik ketika yang merasakan perubahan bukan hanya agen pelaksana yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan warga, tetapi juga pembuat kebijakan yang merasakan hal tersebut.

### **1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tahun 2021 mengadakan program bantuan pemerintah penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Program ini didasari oleh dasar hukum dari Peraturan Menteri Riset Dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 26 tahun 2016 mengenai Pedoman RPL pada beberapa landasan hukum seperti UU tentang Sisdiknas No. 20 Tahun 2013, Perpres, dan PP No. 4 Tahun 2014. Dengan diadakannya program ini diharapkan bagi individu yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan (diploma, sarjana, magister) dan sudah bekerja dapat melanjutkan pendidikan dan terdorong untuk terus belajar melalui pendidikan formal di jenjang pendidikan tinggi

### **2. Sumber Daya**

Sumber daya manusia dan sumber daya non manusia merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia dalam program RPL ini terdiri atas keterlibatan pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki nilai penting dalam pembangunan desa. Dalam program RPL ini terdapat sumber daya manusia yaitu para agen pelaksana maupun pembuat kebijakan yang terlibat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun sumber daya non manusia seperti disediakannya uang kuliah tunggal oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak universitas maupun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta pihak pendukung pembuat kebijakan yang



memberikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada.

### **3. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi**

Sejalan dengan peningkatan pengetahuan mengenai ragam dan sifat para pemangku kepentingan, maka kerja sama juga mencakup setidaknya pihak masyarakat, negara, dan swasta. SDGs dibutuhkan untuk diimplementasikan ke desa. Dapat dilakukan dengan membangun desa dengan substansi yang total, namun masih

dikendalikan pada wilayah dan warga yang terbatas. Artinya, peluang keberhasilan penerapan SDGs pada satu desa maupun masing-masing desa menjadi maksimal. SDGs ditempatkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Untuk mengkomunikasikan program ini tidak cukup dengan tatap muka saja. Tetapi didukung oleh perangkat media lain seperti buku cetak, alamat website, maupun konferensi video. Sehingga komunikasi antar anggota maupun antar organisasi masih tetap berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.

### **4. Karakteristik Dari Agen Pelaksana**

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa dari struktur birokrasi maka dapat terlihat karakteristik dari badan pelaksana. Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi secara berulang dalam badan eksekutif yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki dengan menjalankan kebijakan tersebut.

SDGs Desa merupakan kebijakan lapangan agar segera keluar hasil dan manfaatnya bagi warga desa. Permendesa PDPTT No 13/2020 menunjukkan legalitas keputusan dan penerapannya sudah dimulai dengan disusunnya perencanaan di seluruh desa di Indonesia pada tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang artinya keputusan ini legal dan mengikat bagi 74.953 desa. SDGs Desa dipilih sebagai strategi mempercepat bergulirnya roda pembangunan desa. Implementasi SDGs tersebut dapat dilihat dari karakteristik agen pelaksana yang saling berkontribusi untuk mencapai tujuan. Karakteristik dari agen pelaksana mempengaruhi tercapainya tujuan program ini. Karakter para agen pelaksana yang saling mendukung, maka tujuan juga akan menjadi efektif dan efisien untuk dicapai. Apabila sebaliknya, maka ketidak efektifan dan ketidak efisiensi an implementasi kebijakan dapat terjadi. Maka dari itu, implementasi sebuah program harus memiliki aturan yang mengikat agar tujuan dapat sesuai.

## **5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Berdasarkan regulasi perencanaan yang disusun harus merujuk pada data desa terbaru. Proses perencanaan pembangunan desa lazim dimulai dengan identifikasi kekurangan layanan, fasilitas, dan komponen kemajuan desa. Musyawarah desa memutuskan untuk memenuhi aspek-aspek yang masih belum terwujud di desa. Untuk menjaga ketahanan ekonomi desa dapat dilakukan dengan cara melakukan pengembangan bumdes. BUMDes dapat diarahkan untuk mendukung usaha ekonomi warga yang sudah berkembang di desa, agar berkembang lebih pesat lagi. Dalam hal ini sebelum terdapat program RPL kondisi ekonomi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah mampu memenuhi kebutuhan warga pada masing-masing desa. berbeda halnya dengan kondisi sosialnya, kondisi sosial yang dialami warga menjadi berubah lebih baik ketika program RPL ini ada. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme warga desa yang sering aktif bertanya serta para pegawai pemerintah desa yang juga menjadi aktif dan tanggap mengenai apa yang kurang terhadap pelayanan yang dilakukan. Terjadinya perubahan yang positif tersebut dapat menjadi acuan bagi desa lain untuk menjadi setara ataupun lebih baik dalam mewujudkan *Sustainable Development Program* Nomor 18.

## **6. Disposisi Dari Pelaksana**

Langkah penting mengawal implementasi SDGs Desa dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan yang mencakup kegiatan pengembangan kapasitas, pelatihan, aksistensi teknis, dan pendampingan. Fasilitas tidak cukup jika hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga perlu didukung pegiat desa lainnya, seperti tokoh desa, LSM, perguruan tinggi, lembaga-lembaga internasional, bahkan dunia usaha. Pendampingan penting dilakukan secara berkelanjutan dan secara emansipatif oleh aktor-aktor lokal, sebagai upaya kaderisasi untuk menjaga laju pembangunan desa. Bentuk disposisi pada implementasi program RPL berupa bentuk dukungan yang datang dari berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama mengenai SDGs Desa. Menurut (Edward, 1980) menyatakan bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan kebijakan. Jadi disposisi yang positif juga akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan oleh agen pelaksana maupun pembuat kebijakan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Bersasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tim peneliti, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi perangkat desa untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, Unesa sudah berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada analisis dari enam indikator berikut:

##### 1. Standar dan tujuan kebijakan

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tahun 2021 mengadakan program bantuan pemerintah penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Program ini dilakukan kerjasama oleh banyak perguruan tinggi, tidak hanya perguruan tinggi negeri saja tetapi juga perguruan tinggi swasta yang diwadahi ke dalam Forum Perguruan Tinggi Desa (PERTIDES).

##### 2. Sumber daya

Untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, perlu dilakukan rekognisi pembelajaran lampau terhadap pengalaman kerja di desa menjadi kredit mata kuliah untuk menempuh pendidikan lanjut pada jenjang S1/D4 dan S2. Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara beserta penyandang dana beasiswa melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) melalui program *pilotting* oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menyediakan Uang Kuliah Tunggal bagi sekitar 1600 peserta RPL Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, pengelola BUM Des/ BUM Desma, Tenaga Pendamping (TPP), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan pegiat lainnya yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro. Terdapat fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus berupa sarana dan prasarana secara luring maupun daring. Tidak terlepas dari pihak Universitas saja, Pemerintah Desa di Kabupaten

Bojonegoro juga telah melengkapi sarana dan prasarana.

### 3. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Program RPL diawali dengan pelaksanaan pendaftaran dan juga acara pembukaan sesuai jadwal yang telah disusun. Selain jadwal yang tersusun, ada juga ketentuan maupun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta program RPL. Kemudian diseleksi oleh pihak Universitas untuk mengetahui kriteria calon peserta. Saat pendaftaran RPL Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara diikuti oleh 325 calon peserta. Dalam proses seleksinya hanya 295 mahasiswa RPL. Hanya 282 mahasiswa RPL Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara yang aktif dan terbagi menjadi 6 kelas. Pelaksanaan perkuliahan diawali dengan pembukaan yang dihadiri oleh implementor dengan tujuan para mahasiswa mengetahui dan mengenal yang dilakukan secara offline di Gedung Graha Unesa.

### 4. Karakteristik dari agen atau organisasi pelaksana

Dengan adanya kelas RPL sejumlah 6 kelas tentu menambah beban tugas mengajar bagi para dosen di Prodi. Namun pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara pihak kampus seperti dosen menikmati perannya. Hanya saja perbandingan jam kerja yang dilakukan cukup melebihi kapasitas jam kerja daripada biasanya. Namun hal tersebut dapat ditangani oleh para agen pelaksana kampus dengan baik. Dapat dibuktikan saat perkuliahan daring melalui diskusi dengan adanya tanggapan aktif dan inspirasi dari para mahasiswa yang menceritakan inovasi dan program maupun pengalaman di masing-masing desa para peserta program RPL. Hal tersebut memberikan manfaat pada kepercayaan diri pada saat mengeluarkan pendapat ketika dalam rapat kantor.

### 5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Untuk memperkuat kelembagaan Desa, maka Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Unesa bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan kegiatan *Workshop* dengan tujuan memberikan pemahaman kepada perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro agar pembangunan di desa menjadi lebih terarah terhadap pentingnya pelaksanaan *SDGs* dan pencapaian *SDGs*. Dalam program RPL dilakukan pelatihan secara teori mengenai pelayanan yang baik. RPL memberikan hasil yang positif bagi warga dan perangkat desa. hal ini dibuktikan dengan wawasan yang telah dimiliki oleh para perangkat desa yang mengikuti program RPL. Antusiasme program ini bukan hanya dirasakan oleh para perangkat desa yang mengikuti program ini. Tetapi juga dirasakan oleh

warga desa. Warga desa memiliki harapan lebih terhadap program RPL yang dilaksanakan.

#### 6. Disposisi dari pelaksana

Kemajuan dan capaian desa-desa tidak lepas dari dukungan kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak. Artinya, pencapaian SDGs Desa akan sangat bergantung dari komitmen kuat dan sinergi dari semua pihak. Kabupaten Bojonegoro sangat mendukung program RPL ini dan dapat dilihat dari izin yang diberikan oleh kepala desa kepada para pegawai yang akan mendaftar program ini. Selain itu, jadwal perkuliahan yang bentrok dengan jadwal kerja, pegawai diberikan izin untuk mengikuti perkuliahan di jam kerja mereka. Upaya untuk menjaga kualitas perkuliahan program RPL Desa, Unesa juga secara aktif melakukan monev yang dijadwalkan tiap semester yang dilakukan oleh Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, prodi program RPL Unesa, pihak LP3 Unesa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan penanggung jawab kelas masing-masing prodi yang membahas tentang kendala dan masukan dari mahasiswa RPL selama perkuliahan berlangsung.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya:

1. Dapat mendeskripsikan karakteristik dari agen pelaksana atau implementor secara lebih rinci agar tujuan maupun maksud dari implementasi program RPL bagi perangkat desa untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dapat menjadi evaluasi
2. Dapat mendeskripsikan tentang kondisi ekonomi, sosial, dan politik dari pemerintah desa yang akan peneliti selanjutnya lakukan

## DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2022, November 26). 393 Desa di Bojonegoro Telah Memiliki BUMDes. Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia.
- Bagiastuti, N. K., Damayanti, I. W., & Astuti, N. S. (2020). MODEL PENGEMBANGAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MEMPERKUAT KERANGKA KUALIFIKASIONAL INDONESIA. *ISAS Publishing*, 556-561.
- Bappenas. (2015, November 26). *www.bappenas.go.id*. Retrieved from bappenas web site: <http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/berita-harianbappenas/konsep-SDGs-kerangka-pembangunan-pasca-2015/>
- Breman, J. G., & Wiradi. (2004). Masa Cerah dan Masa Seram di Pedesaan Jawa, Studi Kasus Dinamika Soiso-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad Ke-20. Dalam F. Husken, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980* (hal. Terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Budi, W. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Buku Kita.
- Budiono, & Puspa, I. (2018). Tesis: Analisis implementasi Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. *Badan PPSDM Kesehatan*.
- Edwards III, & George C. (2003). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Edward, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Dalam J. Widodo, *Analisis Kebijakan*. Washington D.D.: Congressional Quarterly Inc.
- Geertz, C. (1986). *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Jakarta: Grafiti Pr.
- Irhamsyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 46-48.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transformasi. (2022). *Panduan Program Sarjana Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) 2022-2024*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakatn Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Leo, A. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPL.
- Leo, A. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT REmaja Rosdakarya
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen*

*Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pressman, J., & Wildavsky. (1973). *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press.

Priadi, A. A., Nugroho, E., & Sularno, H. (2019). Desain Model Sertifikasi Profesi Teknik Kapal untuk Dosen dengan. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 13-18.

Pribadi, R. E. (2017). IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PAPUA. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 917.

Samudra, W. (2004). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Supriatna, T. (1997). *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.

# Hasil Review Laporan Akhir

## 1. JUDUL PENELITIAN

IMPLEMENTASI PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) BAGI PERANGKAT DESA UNTUK MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA (STUDI PADA PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA, FISH UNESA

Bidang Fokus	Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema	Lama Kegiatan (Tahun), Jumlah keterlibatan mahasiswa (Orang)
Sosial dan Humaniora	2022 Penelitian Kompetitif LPPM	2022 Penelitian Dasar (LPPM)	1 3

## 2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
Dra. Meirinawati, M.AP. Ketua Pengusul	Universitas Negeri Surabaya	Ilmu Administrasi Negara S1		6009357
Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Anggota Pengusul 1	Universitas Negeri Surabaya	Ilmu Administrasi Negara S1	Anggota Pengusul 1 Pengumpulan data	
Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Anggota Pengusul 2	Universitas Negeri Surabaya	Ilmu Administrasi Negara S1	Anggota Pengusul 2 Koordinator Pengumpulan Data, membantu penyusunan instrumen penelitian dan analisis data	
Dra. Hj. Suhartiningih, M.Pd. Anggota Pengusul 3	Universitas Negeri Surabaya	Pendidikan Tata Boga S1	Anggota Pengusul 3 Pengolah data penelitian	



### 3. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Luaran PPM berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

#### Luaran Wajib

Jenis Luaran	Status target capaian (sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai, terdaftar/granted)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
Pemakalah pada Seminar Internasional	Accepted	Tuliskan nama forum yang akan dituju : Seminar Internasional FISH Unesa

#### Luaran Tambahan

Jenis Luaran	Status target capaian (sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai, terdaftar/granted)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

## LEMBAR PEMBAHASAN

### Laporan Akhir Penelitian yang berjudul

IMPLEMENTASI PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) BAGI PERANGKAT DESA UNTUK MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA (STUDI PADA PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA, FISH UNESA

### Dengan pelaksana berikut :

1. 0021056804 - Dra. Meirinawati, M.AP. (Ketua)
2. 0029077404 - Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.
3. 0019018306 - Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.
4. 0022115702 - Dra. Hj. Suhartiningsih, M.Pd.

Telah dipaparkan pada tanggal 26 Desember 2022 di LPPM Universitas Negeri Surabaya

### Catatan :

1. Perlu dideskripsikan kendala atau problem implementasi program RPL dari berbagai sisi (mahasiswa, proses, dan SDM dosen)
2. Luaran penelitian dikawal sampai publish

Surabaya, 26 Desember 2022  
Reviewer,



Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A.  
NIP 197703012002121003

## LEMBAR PENGESAHAN 2

### Laporan Akhir Penelitian yang berjudul

IMPLEMENTASI PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) BAGI PERANGKAT DESA UNTUK MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA (STUDI PADA PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA, FISH UNESA

### Dengan pelaksana berikut :

1. 0021056804 - Dra. Meirinawati, M.AP. (Ketua)
2. 0029077404 - Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.
3. 0019018306 - Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.
4. 0022115702 - Dra. Hj. Suhartiningsih, M.Pd.

Telah direvisi pada tanggal 26 Desember 2022 di LPPM Universitas Negeri Surabaya

Surabaya, 26 Desember 2022  
Reviewer,



Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A.  
NIP 197703012002121003

## LEMBAR PEMBAHASAN

### Laporan Akhir Penelitian yang berjudul

IMPLEMENTASI PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) BAGI PERANGKAT DESA UNTUK MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA (STUDI PADA PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA, FISH UNESA

### Dengan pelaksana berikut :

1. 0021056804 - Dra. Meirinawati, M.AP. (Ketua)
2. 0029077404 - Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.
3. 0019018306 - Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.
4. 0022115702 - Dra. Hj. Suhartiningsih, M.Pd.

Telah dipaparkan pada tanggal 26 Desember 2022 di LPPM Universitas Negeri Surabaya

### Catatan :

Daftar isi disesuaikan, penamaan Bab 2 dan Sub Bab 2 A (Kajian Pustaka dan Landasan Teori) direvisi. Tanda baca akhir kalimat dicek kembali. Luaran penelitian diunggah.

Surabaya, 26 Desember 2022  
Reviewer,



Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.  
NIP 197104281999032001

## LEMBAR PENGESAHAN 2

### Laporan Akhir Penelitian yang berjudul

IMPLEMENTASI PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) BAGI PERANGKAT DESA UNTUK MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA (STUDI PADA PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA, FISH UNESA

### Dengan pelaksana berikut :

1. 0021056804 - Dra. Meirinawati, M.AP. (Ketua)
2. 0029077404 - Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.
3. 0019018306 - Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.
4. 0022115702 - Dra. Hj. Suhartiningsih, M.Pd.

Telah direvisi pada tanggal 26 Desember 2022 di LPPM Universitas Negeri Surabaya

Surabaya, 26 Desember 2022  
Reviewer,



Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.  
NIP 197104281999032001

**IMPLEMENTATION OF PAST LEARNING RECOGNITION (RPL) PROGRAM FOR VILLAGE EQUIPMENT TO ACHIEVE VILLAGE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) (STUDY IN STATE ADMINISTRATIVE SCIENCE STUDY PROGRAM, FISH UNESA)**

**Meirinawati**

Bachelor of State Administration Science, Faculty of Social Sciences and Law, State University of Surabaya  
meirinawati@unesa.ac.id

**Indah Prabawati, Eva Hany Fanida, Suhartiningsih**

Bachelor of State Administration Science, Faculty of Social and Law, State University of Surabaya  
indahprabawati@unesa.ac.id, evafanida@unesa.ac.id, suhartiningsih@unesa.ac.id

**Abstract**

In an effort to achieve the fourth goal of Village SDGs to realize quality village education, the Ministry of Villages PDPT developed a collaboration with the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Home Affairs signed a work agreement on affirming the implementation of higher education for Kades, PD, BPD, RPL-based village assistants as well as the MBKM program. So in 2022 the development of the Village RPL pilot program for the Bojonegoro Regency Government, East Java Province, will be implemented. Implemented in collaboration with UNY and Unesa. One of the study programs that took part in it was the Bachelor of State Administration Study Program, Unesa Public Administration Department. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Using Purposive Sampling technique. Data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. Data analysis using the Van Meter and Van Horn approaches, namely policy standards and objectives, resources, implementation activities and inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, economic, social and political conditions, dispositions of implementers. The results of this study are, (1). Standard indicators and policy objectives, RPL is learning outcomes through formal, non-formal, informal education, or work experience into formal education, (2) Resource indicators, Ministry of Village PDPT and scholarship funders through a pilot program by the Bojonegoro Regency Government to provide UKT, (3) Indicators of implementation activities and communication between organizations, lectures begin with an opening by the implementor so that students know and know, (4). Characteristic indicators of implementing agencies or organizations,

**Keywords:**SDGs, RPL, Bojonegoro Regency Government

**Abstract**

In an effort to achieve the fourth goal of the Village SDGs to realize quality village education, the Ministry of Villages developed cooperation with the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Home Affairs signed a working agreement on the affirmation of higher education implementation for villages heads, PDs, BPDs, RPL-based village assistants as well as the MBKM program. So in 2022, the pilot development of the RPL Village program was implemented by the Bojonegoro Regency Government, East Java Province. Implemented in collaboration with UNY and Unesa. One of the study programs that participated in it was the Bachelor of State Administration Department of Public Administration Unesa. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Using Purposive Sampling technique. Data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. Data analysis through the Van Meter and Van Horn approach, namely policy standards and objectives, resources, implementation activities and interorganizational communication, characteristics of implementing agents, economic, social and political conditions, disposition of implementers. The results of this study are, (1). Indicators of policy standards and objectives, RPL is the achievement of learning through formal, non-formal, informal education, or work experience into formal education, (2) Indicators of resources, Kemendes PDPT and scholarship funders through a pilot program by the Bojonegoro Regency Government to provide UKT, (3) Indicators of implementation activities and inter-organizational communication, the lecture begins with an opening by the implementor so that students know and recognize, (4). Indicators of the characteristics of the implementing agent or organization, there is a comparison of working hours as evidenced by the greater capacity of working hours, (5) Indicators of social and political economic conditions, S1 IAN Study Program in collaboration with Dispermades conducts workshops, (6) Indicators of disposition of the implementer, Bojonegoro Regency Government support is seen from the village head's permission to employees who will register for this program.

**Keyword:**SDGs, RPL, Bojonegoro District Government

## PRELIMINARY

In improving the quality of human resources, one of the important factors is the quality of education, both physically and non-physically. Education can fully influence the growth of a nation. The conception in the context of the post-2015 development framework/agenda, which is called the Sustainable Development Goals (SDGs). The concept of SDGs is needed as a new development framework that accommodates all the changes that have occurred after 2015. There are three pillars that serve as indicators in the concept of developing SDGs, namely, first, indicators that are inherent in human development (Human Development), including education, health. The second indicator is inherent in the small environment (Social Economic Development), such as the availability of environmental facilities and infrastructure, as well as economic growth. To carry out efforts to achieve village sustainable development goals, especially the fourth goal, realizing quality village education, the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration developed a collaboration with the Ministry of Education, Culture, Research and Technology and the Ministry of Home Affairs signed a work agreement on the affirmation of the implementation of higher education for village heads, village officials, village consultative bodies (BPD), professional assistants (village assistants) based on past learning recognition as well as independent learning programs. As a concrete action, in 2022 the development of the Village RPL pilot program will be implemented for Bojonegoro Regency, East Java Province.

One of the study programs that took part in it was the Bachelor of State Administration Study Program, Unesa Public Administration Department. This research focuses on the Implementation of the Past Learning Recognition Program (RPL) for Village Officials to Achieve Village Sustainable Development Goals (SDGs) in Higher Education. In this regard, the formulation of the questions in this research is as follows, How is the implementation of the Past Learning Recognition Program (RPL) for Village Officials to Achieve Village Sustainable Development Goals (SDGs) in Bachelor of State Administration Study

Program, FISH, Unesa? The goal to be achieved in this study is to describe the Implementation of the Past Learning Recognition Program (RPL) for Village Officials to Achieve Village Sustainable Development Goals (SDGs) in the Bachelor of State Administration Study Program, FISH, Unesa.

The benefits that can be given to this research are theoretical benefits and practical benefits, theoretical benefits, namely this research is expected to be useful for researchers and increase researchers' knowledge in terms of implementing the Recognition of Past Learning (RPL) program for village officials to achieve Village Sustainable Development Goals (SDGs) in State Administration Study Program, FISH, Unesa. It is also hoped that this research can train scientific thinking based on the principles of science that have been studied during college.

for Educators that the results of this research are expected to be useful and become material for evaluating educators together with higher education leaders to continue to make improvements and updates in the process of implementing past learning recognition programs, and for other researchers it is hoped that they can be used as a reference for further research that is relevant to the title this research. Variable Operational Definitions in this study are Higher Education, namely Education Units that organize Higher Education, Village Devices, namely Each individual Village Head, Members of the Village Consultative Body, Management of BUM Desa/BUM Desma, Professional Assistance Staff, village community empowerment cadres (KPMMD), and Village Community Empowerment Activists have the same opportunity to pursue higher education through Village RPL,

*Sustainable Development Goals* that is Integrated village development efforts to accelerate the achievement of sustainable development goals with eighteen goals, Implementation of Policies, namely Actions carried out by government officials, both individuals and groups that aim to achieve goals in accordance with the policy formulation. Implementation of policies with the approach model formulated by Van Meter and Van Horn is called A Model of the Policy

Implementation (1975). This model explains that policy implementation is in accordance with political decisions, implementers and performance of public policies. The proposed policy implementation model is depicted in the figure.

**Picture1**

**Implementation of Van Meter and Van Horn**

**Model Policies**



*Sumber : van Meter van Horn dalam Agustino (2016:136)*

Figure 1 illustrates how the implementation of the policy with the Van Meter and van Horn models. This model determines and explains the relationship between the independent variable and the dependent variable. By using this model, satisfactory indicators can be formed and the right data can be collected. So it has great hope in describing the process by observing the implementation of the policy compared to just connecting the independent and dependent variables in a non-directive way. This model illustrates that the basic policy has six variables by forming a relationship between policy and performance, these variables are: (1) Policy standards and objectives, standards and objectives must have been determined in a policy which is then to be implemented by implementers. Policy performance is used to assess the achievement of these standards and targets. So that these standards and goals must be formulated specifically and concretely (Wibawa, 1994:20). According to Van Meter and van Horn, the most important stage in analyzing policy implementation is identifying achievement indicators. Realized policy standards and objectives are assessed by performance indicators. This is because it is useful in formulating overall decision objectives, (2) Resources, Van Meter and Van Horn (in Widodo 1974) argue that policy resources are also very important. Humans are an important resource in determining the success of policy

implementation. In addition to expediting the administration in implementing policies must provide resources. The resources in question are funds or other incentives. Because limited funds can be a factor that frustrates policy implementation, (3) Implementation and communication activities between organizations, according to Van Meter and Van Horn (in Widodo 1974), clarity of standards and objectives as well as accuracy and consistency in communication of these standards and objectives determines implementation. effective policy. Van Meter and Van Horn also argue that the Institution's mechanisms and procedures are necessary for successful implementation. Because it really helps executors in acting in a consistent way. The hierarchical position of officials in the organization causes them to have personnel influence and power. The influence and power in question are recruitment and selection, control over budget allocations, subordinate career paths, can influence the behavior of subordinates and have authority in responding to policy achievement, (4) Characteristics of the implementing agent / implementor, Van Meter and Van Horn argue that from the bureaucratic structure, the characteristics of the implementing agency can be seen. The bureaucratic structure is the characteristics, norms and patterns of relationships that occur repeatedly in the executive body related to the potential possessed by carrying out the policy. The characteristics of the formal structure and informal attributes are important components of this model. Apart from that, paying attention to the ties between implementing agencies and actors in the system that convey policies really needs to be done (Winarno, 2004: 116) (5) Social and political economic conditions. economics and politics. This is taken from logical inference from the policy system chart. The factor that also influences the results of policy implementation is the participation of the internal environment mix. The source of the problem from the failure of policy implementation performance can also be caused by the non-conductive social, economic and political environment. Therefore, for policy implementation to run smoothly and under control, the external environment must be conducive. (6) Disposition of



implementers, Van Meter and Van Horn argue that the success or failure of policy implementation is also strongly influenced by the attitude of acceptance or rejection of policy implementing agents. This happened because the policies implemented were not the result of the thoughts of local residents who knew well the problems and problems they felt. However, public policies are usually top down in nature decision makers do not know the needs, desires or problems that must be resolved (Augustine 2006). Understanding the standards and policy objectives is very important. Because the failure of a successful policy implementation is due to the fact that the implementers are not aware of the standards and objectives of the policy. So that the direction of the executor's disposition becomes important as well. The failure of implementers to implement the policy is because they reject the policy objectives (Van Mater and Van Horn, 1974). Therefore, the intensity of the disposition of implementers can influence policy implementation. Because the failure of implementation is due to the limited intensity of the disposition.

**RESEARCH METHODS**

The type of research used in this study is a descriptive study research method with a qualitative approach. The descriptive research method is defined as a problem-solving procedure that is investigated by describing, identifying, or describing the state of the subject/object of research (a person, institution, community, etc.) at the present time based on the facts that appear or as they are (Nawawi, 1998). Qualitative research is a research method based on the philosophy of postpositivism, used to examine the condition of natural objects, where the researcher is the key instrument, data collection techniques are triangulation, data analysis is inductive or qualitative, and qualitative research results emphasize meaning rather than generalization.

Based on the problems and research objectives that have been formulated, the research focus is determined. The focus in this study is to use the theory of readiness of State Universities Towards Legal Entity State Universities in order to have research boundaries so that the information collected does not go off topic and makes it easier for researchers to process the information or data obtained. The focus of research in this research is (1) Standards and policy objectives, (2) Resources, (3) Implementation activities and communication between organizations,

- (4) Characteristics of implementing agents / implementors
- (5) Economic, social and political conditions
- (6) The disposition of the executor.

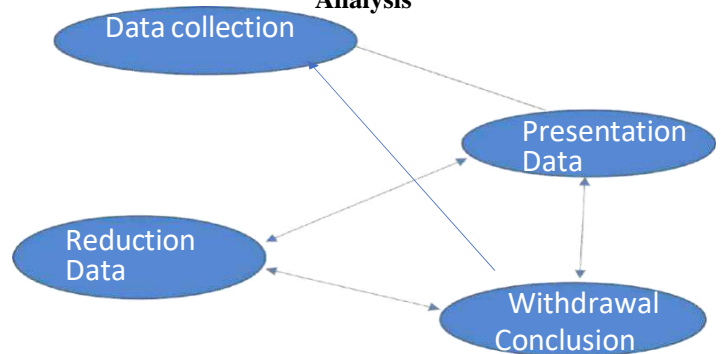
Research informants are parties who are considered to have competence related to the study to be studied. Determination of informants in research is determined by purposive sampling, namely those who are considered to have information in relation to the research. The informants in this study were the Vice Dean for Academic Affairs at FISH Unesa, Dr. Wiwik Sri Utami, MP, Head of the Department of Public Administration, Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si, Head of LP3 namely Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd, Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si, Agus Utomo (Head of Bakulan Village, Temayang District), Deni Susanto (Head of Clebung Village Administration, Bubulan District).

The source of research data is crucial. Research requires data to be analyzed and interpreted to answer the problem formulation. Opinions from Lofland and Lofland (in Moleong, 2015: 157) say that the main data sources in qualitative research are words or actions, additional data such as documents. Data sources based on their type are divided into two groups, namely Primary Data and Secondary Data.

Data collection techniques used in research are interviews, observation, and documentation studies. According to Sugiyono (2014: 244) defines the process of systematically searching for and compiling data obtained from interviews, field notes, and documentation by organizing data into categories, describing them into units, synthesizing, compiling into patterns, selecting which ones are important and what will be learned and draw conclusions so that they are easily understood by oneself and others.

The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis. Qualitative emphasizes its analysis on the process of inference from the results of separate observations into a series of relationships or generalizations. In analyzing the research data, it refers to the qualitative data analysis technique described by Miles and Huberman which includes data collection, data display, data reduction, conclusion (drawing/verifying).

**Picture2. Interactive Model Data Analysis**



Source: Miles and Huberman  
(1992)

## RESULTS AND DISCUSSION

### A. RESULTS

In an effort to achieve the Village SDGs, especially the goal of realizing quality village education, the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration developed a collaboration with the Ministry of Education, Culture, Research and

Technology and the Ministry of Home Affairs signed a work agreement on the affirmation of the implementation of higher education for village heads, village officials, Village Consultative Body (BPD), professional assistance staff (village assistants) based on Past Learning Recognition as well as the independent learning program. As a concrete action, in 2022 the development of the RPL DESA pilot program will be implemented in collaboration with Yogyakarta State University (UNY) and Surabaya State University (Unesa). Surabaya State University is one of the State Universities in Surabaya which was established on December 19, 1964. Unesa already has seven faculties located in different locations. A total of four faculties are located at the Ketintang Campus, namely the Faculty of Social Sciences and Law, the Faculty of Economics, the Faculty of Engineering, and the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Meanwhile, three other faculties are located at the Lidah Wetan Campus, namely the Faculty of Sports Science, the Faculty of Education, and the Faculty of Languages and Arts.

In 1964 the Faculty of Social Sciences and Law was established under the name of the Faculty of Social Sciences Education (FPIPS). Currently, it has six majors and eight study programs, namely: Public Administration Department with a Bachelor of Public Administration Study Program; Geography Department with S1 Geography Education Study Program and S1 Social Sciences Education Study Program; Department of Social Sciences with S1 Sociology and Communication Studies Study Program; Department of Pancasila Moral Education and State Citizenship; and the Department of History with a Bachelor of History Education Study Program. The total lecturers at FISH Unesa are 112 lecturers in eight study programs. In addition, for the smooth process of activities at FISH Unesa, there are 38 education staff. The Tendik are assigned to take care of operations in each department and some are in charge of managing operations at the faculty level. One of the faculties implementing the RPL program is the Faculty of Social Sciences and Law in the Bachelor of Sociology Study Program and the Bachelor of State Administration Study Program. Most prospective students are in the Faculty of Social Sciences and Law, especially in the Bachelor of State Administration Study Program as evidenced by the full

number of students in the classroom. Based on the data obtained by researchers. Then an assessment can be carried out regarding the Implementation of the Past Learning Recognition Program (RPL) to Achieve Village SDGs (Studies in the Bachelor of State Administration Study Program, FISH Unesa) through the description of the research focus below. Most prospective students are in the Faculty of Social Sciences and Law, especially in the Bachelor of State Administration Study Program as evidenced by the full number of students in the classroom. Based on the data obtained by researchers. Then an assessment can be carried out regarding the Implementation of the Past Learning Recognition Program (RPL) to Achieve Village SDGs (Studies in the Bachelor of State Administration Study Program, FISH Unesa) through the description of the research focus below. Most prospective students are in the Faculty of Social Sciences and Law, especially in the Bachelor of State Administration Study Program as evidenced by the full number of students in the classroom. Based on the data obtained by researchers. Then an assessment can be carried out regarding the Implementation of the Past Learning Recognition Program (RPL) to Achieve Village SDGs (Studies in the Bachelor of State Administration Study Program, FISH Unesa) through the description of the research focus below.

#### 1. Policy Standards and Objectives

Standards and objectives must have been determined in a policy which is then to be implemented by the executor. Based on the mandate of the 1945 Constitution Article 31 it is stated that every country has the right to education. The government is obliged to develop a national education system and all citizens get education. With the aim of educating the nation's life and human welfare by upholding religious values and national unity. Referring to Presidential Regulation Number 85 of 2020, the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration has the task of administering government affairs in the field of village and rural development, empowering rural communities, accelerating the development of underdeveloped areas, and transmigration.

Then it is supported by the Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 41 of 2021 Concerning Recognition of Past Learning. In 2021, 45,387 village heads, 43,876 village secretaries, 31,147 BUM Desa administrators, and 7,889 professional assistants are high school graduates/equivalent. A total of 20,450 village heads, 25,721 village secretaries, 15,477 BUMDes administrators, and 23,735 professional assistants with Bachelor/D4 graduates. To increase access to higher education, the Directorate General of Higher Education,

Ministry of Education, Culture, Research and Technology, through the Directorate of Learning and Student Affairs, in 2021 will hold a government assistance program for implementing Type A2 Past Learning Recognition.

Recognition of Past Learning is recognition of one's learning achievements obtained through formal, non-formal, informal education, or work experience into formal education. This program is based on the legal basis of the Minister of Higher Education Research and Technology Regulation No. 26 of 2016 regarding RPL Guidelines on several legal bases such as the Law on National Education System No. 20 of 2013, Perpres, and PP no. 4 of 2014.

By holding this program, it is hoped that individuals who have not had time to complete their education (diploma, bachelor, master) and are already working can continue their education and be encouraged to continue learning through formal education at the higher education level. Opinion in accordance with the statement above was expressed by Mr. Agus, the Bakulan Village Head stated:

"As village head, I also participate to encourage maximum learning so that future benefits can be utilized by villages with increased capacity. According to monitoring, the enthusiasm of the participants was extraordinary because our initial intention was to improve quality or competence in providing services."

In the Recognition of Past Learning program, this can be recognized as learning outcomes in the form of obtaining credits for pursuing an undergraduate or postgraduate level. But for now the RPL program being implemented is at the S1 level. For undergraduates, they can come from high school graduates or equivalent or have attended college and have a minimum of 2 years experience or at least have a clear training certificate. Whereas for masters programs that have studied masters and have not continued or have work experience or have certified training, they will receive 1 semester of assistance.

In an effort to realize this, a Collective Labor Agreement was signed on 20 February 2021 in Jakarta. In this program, collaboration is carried out by many universities, not only state universities but also private universities which are accommodated in the Village Higher Education Forum (PERTIDES). The PERTIDES Forum is committed to supporting village and rural development through improving the quality of community education. The PERTIDES Forum is committed to and fully supports the implementation of the Village RPL Program and will develop educational programs in their respective environments. To date, 13

PTN/PTS have developed RPL programs for undergraduate and postgraduate levels. the hope,

As a follow-up, a document on the Guidelines for the Recognition of Village Past Learning Program was also prepared which is regulated in Ministerial Decree Number 122 of 2021 which contains several aspects related to mechanisms, procedures and technical and administrative procedures for managing the Village RPL Program starting from the recruitment process, assessment, learning process, assessment and graduation. As the goal is at the basis of the state, the RPL program aims to provide opportunities for Village Heads, Village Officials, Members of the Village Consultative Council, BUMDes Managers, Professional Assistance Workers, and Village Community Empowerment Activists to pursue higher education through the RPL pathway. This is in accordance with the opinion of Mr. Deni as the Head of Clebung Village Administration who said:

"As Head of Village Government, I understand what implementation is in accordance with the theory, as well as the enthusiasm of participants in other subjects. The way we do some participants plan an agenda to discuss the RPL program (assignments)."

## 2. Resource

Policy implementation needs to be supported by human and non-human resources. The human resources in the RPL program consist of the involvement of development actors and the empowerment of village communities who have important values in village development. Thus, in order to accelerate the achievement of sustainable development goals and improve the quality of human resources in villages, it is necessary to recognize past learning from work experience in villages as course credit for pursuing further education at the S1/D4 and S2 levels. Therefore, the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration together with Higher Education Organizers and scholarship funders implemented Recognition of Village Past Learning (RPL Desa) through a pilot program by the Bojonegoro Regency Government which provided Single Tuition Fees for around 1600 Village RPL participants consisting of Village Heads, Village Officials, BPD members, BUM Des/BUM Desma managers, Assistance Staff (TPP), Village Community Empowerment Cadres (KPMd), and other activists domiciled in Bojonegoro Regency. The Bojonegoro Regency Government provides Single Tuition Fees for students who qualify through funding sources in Bojonegoro Regency in the form of the Regional Budget. Village Community Empowerment Cadres (KPMd), and other activists

domiciled in Bojonegoro Regency. The Bojonegoro Regency Government provides Single Tuition Fees for students who qualify through funding sources in Bojonegoro Regency in the form of the Regional Budget. Village Community Empowerment Cadres (KPMD), and other activists domiciled in Bojonegoro Regency. The Bojonegoro Regency Government provides Single Tuition Fees for students who qualify through funding sources in Bojonegoro Regency in the form of the Regional Budget.

This has been regulated in Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Regulations for Implementing Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Furthermore, through the Regulation of the Minister of Village, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration Number 13 of 2020 concerning Priority for Use of Village Funds in 2021, mandates the use of Village Funds to be directed to programs within the context of Village Sustainable Development Goals (SDGs), namely realizing Villages without poverty and hunger, Economic Villages grow evenly, Villages care about health, Villages caring for the environment, a village that cares about education, a village that is friendly to women, a village that is networked, and a village that is culturally responsive.

To realize the goals of the Village SDGs, in 2022 the Village RPL Program in Bojonegoro Regency, East Java Province will work together with Yogyakarta State University (UNY) and Surabaya State University (Unesa). To achieve common goals, good cooperation is also needed between the Ministry of Villages represented by heads of agencies in the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, Organizing Colleges consisting of University Chancellors, Deputy Chancellors, Heads of Study Programs, to study program lecturers who directly go down field to teach students, along with scholarship funders. However, not all study programs are suitable for this RPL program.

Therefore, by selecting study programs that are in accordance with the objectives of the RPL program, five appropriate undergraduate study programs were selected, namely Public Administration, Management, Accountants, Sociology, and Non-School Education. This RPL program can be pursued for 2 years through a recognition process for the expertise and experience possessed in the development and empowerment of village communities. In its implementation, one of the study programs that is most in demand at Unesa is the Bachelor of Public Administration which consists of 6 classes. According to Mrs. Tjitjik Rahaju, a lecturer who is also the Head of State Administration Study Program, said:

"In one class, there are several villages. This happened because during registration, each

village was given a quota so they would not enter the same study program or university. For example, in one generation, one village is only given a quota of 2 people. Because there are quite a lot of enthusiasts in this study program and there are quite a number of villages in Bojonegoro."

Apart from the need for cooperation, other supporting factors are also needed, such as facilities and infrastructure at Unesa. This can be seen from the facilities provided by the campus which provide facilities and infrastructure both offline and online.

According to Mrs. Wiwik Sri Utami as Deputy Dean for Academic Affairs FISH said:

"In terms of facilities and infrastructure, we have provided classrooms that will be used in teaching and learning activities, adequate internet when offline, other than that such as permits and easy access for both students and lecturers such as administration, assignments, legal and official correspondence so that it can be done easily. easy so that the implementation and objectives of the existence of this RPL program".

Apart from the university, the Village Government in Bojonegoro Regency has also provided facilities and infrastructure. Facilities available at the village office include laptops and the internet. In one of the villages a policy was implemented by lending laptops to members of village officials who attended RPL lectures. This was conveyed by Mr. Agus, a participant in the RPL program who is also the Head of Bakulan Village, Temayang District, who said:

"The facilities and infrastructure in the village office are also equipped with laptops and the internet. This laptop is specifically facilitated for the RPL program. In Bakulan village there were 6 participants from different institutions BPD, Head of BUMDes, and village officials so each participant got a laptop loan facility. If the internet had been facilitated by the village before the RPL program existed."

If seen from the statements by several sources, it can be proven that the implementation of the RPL program so far has been well adapted by implementers.

### **3. Inter-Organizational Implementation and Communication Activities**

According to Van Meter and Van Horn (inWidodo 1974), clarity of standards and objectives as well as accuracy and consistency in the communication of these standards and objectives determines the implementation of effective policies. One of the characteristics of the SDGs is that they have a formulation in the form of a statement of objectives, meaning that indicators are compiled and directed to achieve predetermined goals that refer to individual goals. The SDGs target always aims at fulfilling 100 percent of citizens which can be seen in goal number 4 regarding quality education. Area-related objectives are directed at indicators of the existence of quality use facilities, as well as management of their impact on the local ecosystem.

These goals also include strategies and even cover the required institutions. In line with increasing knowledge about the variety and nature of stakeholder parties, cooperation also includes at least community, state and private parties. SDGs are needed to be implemented in villages. By building a village with total substance, but can be controlled in a limited area and people. This means that the chances of success in implementing the SDGs in one village, in each village, are maximized. SDGs are placed in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 13 of 2020 concerning Priority for Using Village Funds in 2021. Implementation activities and communication between organizations are not carried out suddenly. Rather, discussions were held between the Ministry of Villages, The Development of Disadvantaged Regions and Transmigration together with the Organizing Higher Education Institutions, as well as village officials involved in this program, resulted in a product in the form of a Village Past Learning Recognition Undergraduate Program Guide for the 2022-2024 Academic Year. The guidebook contains matters relating to the procedures for implementing the RPL Program, courses and credits for the specified study programs and there is also an implementation schedule starting from registration. The annual regulation is used as the basis for preparing annual activities and budgeting in each village. The conditions, potential and problems of each village were compiled at the beginning of the year and documented for the public through the kemendesa.go website.

**Picture3. Undergraduate Program Handbook Recognition of Village Past Learning (RPL Desa) 2022-2024**



Source: Research Documentation, 2022

So after that RPL program registration was opened with the following schedule:

No.	Activity	Long	Time
1	Socialization and Bimtek Registration	3 days	18-21 February 2022
2	RPL student registration	3 days	February 21-March 2, 2022
3	Collection and upload portfolio	7 days	18 February-2 March 2022
4	Self Evaluation of Prospective Students	7 days	18 February-2 March 2022
5	RPL participant portfolio assessment	11 days	March 3-12, 2022
6	Interview prospective students RPL (if needed)	2 days	March 13-14, 2022
7	Student assessor session RPL	2 days	March 15-16, 2022
8	Determination of selection results	1 day	March 17, 2022
9	Announcement of student selection RPL	1 day	March 18, 2022
10	RPL scholarship announcement Bojonegoro village	1 day	March 19, 2022

When registering, of course, it is different from regular students, in practice there are things that need to be recognized, such as an SK that has been carried out by participants while working. The SK they have will then be assessed by the study program and converted to the appropriate course. In this program, students will earn a S.Sos degree and are expected to work as Administrators, Organizational Analysts and Public Sector Human Resources, Policy Analysts, Empowerment Facilitators, and Entrepreneurs.

The weight of credits taken during undergraduate study is 144 credits, while the courses that can be taken are divided into 72 credits of Recognition Potential Courses and 72 credits of compulsory courses. Then

next, Compulsory Courses that can be taken by students in semester 1 (one) of 20 credits. The subjects taught are: Introduction to Public Administration, Principles of Management, Organizational Theory, State Administration System, Public Policy, State Administrative Law, State Administration Reform.

Entering semester 2 (two) of 22 credits. The courses taken are Public Sector Human Resource Management, Organizational Behavior, Public Service Management, Digital Governance, State Finance, Administrative Research Methods, Social Statistics. Semester 3 (three) of 18 credits, namely Policy Analysis, Communication and Policy Advocacy, Bureaucracy and Public Governance, Public Administration Ethics, Community Empowerment, Seminar on State Administration, Policy Evaluation, semester 4 (four) of 12 credits, namely Environmental Policy, Disaster Management, Inter-Regional Cooperation, Thesis.

During RPL registration, 325 registrants attended the S1 Study Program of Public Administration. After that, recognition was carried out for the activities they participated in with proof of school diplomas, SK village officials, training certificates they participated in. Recognition is done with 1 student in the assessment or assessment with 3 assessors. This recognition assessment is carried out through a system created by PPTI. The results of recognition assessment passed the assessment of 295 prospective students.

In the course of time, out of 295 RPL students who passed the assessment, due to various reasons, in the end, 282 RPL students in the Bachelor of State Administration Study Program who were active (carried out KRS in the Unesa/siakadu academic system) were divided into 6 classes, namely class C, D, E, F, G and H. Class divisions are based on student domiciles that are geographically close together. This is intended to make it easier for students to coordinate and communicate related to the lecture process. The following is a picture of the class distribution map for the Village RPL Program S1 State Administration Study Program:

**Picture4**

**Map of Village RPL Class Distribution for S1 State Administration Study Program**



Source: Unesa State Administration Study Program Documents, 2022

In semester 1 the RPL class lecture schedule is held on Friday and Saturday. This is done considering that village officials work on weekdays. So as not to disturb working hours, the study program has adopted a policy that lectures are held on Fridays and Saturdays. But based on the results of the evaluation it was too hard for students and lecturers to receive lectures and teach starting in the morning at 07.00 until it ends at 18.00 WIB. So that in semester 2 the class schedule changes to 15.30 WIB during working hours from Monday to Friday. This is as expressed by Mrs. Tjik Rahaju as follows:

"Because there were around 286 students accepted at the AN Study Program, so we divided them into 6 classes. And lectures for one semester are held on Friday and Saturday. Entering semester 2, we evaluate it because it is too hard for students and lecturers to teach in one day from 07.00 to 18.00 WIB. So for semester 2, the schedule is made starting in the afternoon at 15.30 during work hours."

In terms of communication between organizations can be seen in The Ministry of Education, Culture, Research and Technology has a special website that contains guidelines for implementing the RPL program called SIERRA (Academic Past Learning Recognition System (RPL)). According to Ms. Tjitjik Rahaju said,

"Coordination carried out by universities can also be seen from the addition of a special platform at SIAKAD called SIMRPL. After registering according to the schedule above. So, an announcement was made by the Bojonegara Regency Government to all villages with a limited quota. This RPL program is in accordance with the Key Performance Indicator Targets (IKU) carried out by UNESA, one of which is cooperation between study programs, faculties, universities, and outside the scope of UNESA."

The same opinion was expressed by Mrs. Wiwik Sri Utami regarding communication saying the following:

"The communication has been going very well. This can be seen from the formation of an FGD between UNESA, District, Ministry of Villages. At first there were obstacles due to technological stuttering because teaching and learning activities were carried out online so the situation and conditions were still not conducive. However, these conditions may change as he gets used to using video conferencing."

When the implementation of the lecture begins with an opening ceremony which is attended by the implementors. During the opening they were placed on the 9th Floor of the Unesa LP3 Building to receive directions from the Dean of FISH and also from the Head of the Department of Public Administration followed by an introductory event with the lecturers in the Bachelor of Public Administration Study Program. The goal is for students to get to know who the leaders are in FISH and get to know the lecturers who will teach later. Furthermore, students took part in the inaugural lecture at the Unesa Graha Building. At the opening of the RPL activities as well as the inaugural lecture was also attended by the Ministry of Villages represented by the heads of agencies in the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, Higher Education Organizers, Chancellors of Universities, Deputy Chancellors, Heads of Study Programs, to study program lecturers. This was conveyed according to Ms. Tjitjik Rahaju who also attended the opening ceremony said:

"The opening ceremony was held at the two universities that held it, namely the first opening at UNY which was also attended by the Ministry of Villages represented by the heads of agencies in the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, Higher Education Organizers, Chancellor of the University, Deputy Chancellor, Head of Study Program, to study program lecturers who go directly to the field to teach students, along with scholarship funders.

The following is the documentation of the inaugural lecture for the 2022 Village RPL class at the Unesa Graha Building on Wednesday, March 30, 2022:

**Picture5**

**Inaugural Lecture for 2022 Village RPL Program Students**



Source: Unesa State Administration Study Program Documentation, 2022



As also stated by one of the lecturers in the State Administration Study Program named Galih Wahyu Pradana, who said:

"RPL lectures for the inaugural lecture are conducted offline. Students come to the Unesa Campus to attend the inaugural lecture. Previously they received briefings from the Dean of FISH and the Head of Public Administration, only after that did they introduce themselves to the lecturers in the Bachelor of Public Administration Study Program. Only after lunch did they get their first lecture at Graha Unesa Building"

The following is the documentation of the general briefing from the briefing from the Dean of FISH and the Head of Public Administration of Unesa for RPL Desa students of the State Administration Study Program on the 9th Floor of the Unesa LP3 Building on Wednesday, March 30 2022:

**Picture6**

**Briefing for Village RPL Students Study Program of State Administration**



Source: Unesa State Administration Study Program Documentation, 2022

#### 4. Characteristics of Executing Agents

SDGs Desa at number 18 was decided by the state, which was initiated by the Ministry of Villages, PDT and Transmigration. SDGs Desa number 18 has been listed in the Regulation of the Minister of Villages, PDT and Transmigration Number 13 of 2020 concerning priority use of village funds in 2021. This means that this decision is legal and binding for 74,953 villages in Indonesia to implement it in 2021. SDGs Desa is a policy for immediately implemented in the field, so that the results and benefits for the villagers will come out soon. PDTT Village Regulation No. 13/2020 shows the legality of the decision and its implementation has started with the preparation of plans for all villages in Indonesia in 2020. The implementation of the planning document which includes Village SDGs number 18 is to be implemented immediately starting January 2020.

Village SDGs were chosen as a strategy to accelerate the wheel of village development itself. The implementation of the SDGs can be seen from the characteristics of implementing agents who contribute to each other to achieve the goals. Implementing agents from the campus such as lecturers carry out their obligations by giving lectures according to the schedule and conditions given.

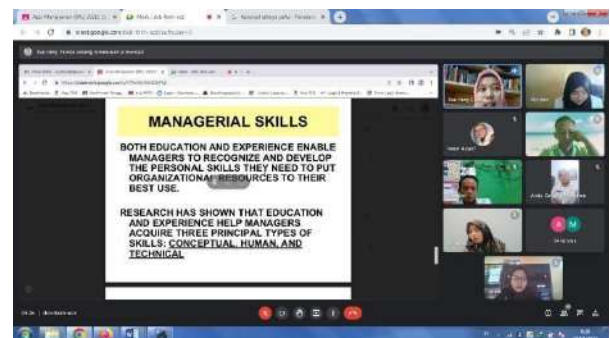
It is undeniable that the existence of 6 classes of RPL classes certainly adds to the burden of teaching assignments for lecturers in the study program. It can be said that the ratio of working hours is sufficient to exceed the capacity of working hours than usual. Because there are quite a lot of regular students in the Undergraduate Program of State Administration and additional students from the RPL program. However, campus implementing agents can handle this matter well. It can be proven that when lectures begin, students are taught in theory, in implementation, and discuss the obstacles that often arise when serving the community. So that the discussions and lectures that were carried out could run well because of the active and inspired responses from students who shared innovations and

programs and experiences in each village where RPL program participants worked. This program is very useful because students gain new knowledge directly and indirectly. As stated by Ms. Eva Hany Fanida as the Secretary of the Department of Public Administration:

"With the additional 6 classes, the lecturers' credits will automatically increase in conducting lectures. Lecturers are given additional responsibilities by teaching RPL classes. It was a bit difficult at first, but now we as lecturers have found a pattern, so we can carry out lectures well."

The following is an example of the implementation of online lectures for students of the Village RPL program, Bachelor of State Administration Study Program:

**Picture7**  
**RPL Village Student Online Lecture**  
**S1 Study Program of State Administration**



Source: Unesa State Administration Study Program Documentation, 2022

This is the same as stated by Mr. Agus Utomo as the Bakulan Village Head, said

"Because when in class he is quite active when discussing this, it has a direct positive impact when dealing with the community. Usually we are passive towards the community, now we can explain to the community and are more open about any matters that are asked by the community. We have also become more active in socializing existing programs. Usually people only know the physical form because of the new infrastructure. But for now the community can also participate in supervising the activities carried out by village officials."

The same opinion was expressed by Mr. Deni, a Head of Clebung Village Administration, who said,

"This RPL program provides mutual benefits between the executing university and village officials who take part in this program. There is an exchange of opinion discussion capable share new knowledge and



experience with each other. We really feel the benefits that can be received by attending RPL lectures. We become more confident in expressing opinions during office meetings”

### 5. Economic, Social, and Political Conditions

One of the important things in implementing the Village SDGs is dynamic institutions, willing to follow the latest data, so that they are agile in formulating policies according to data. In the village, village government institutions play a very important role. The village head and his apparatus carry out various functions to maintain the peace of the residents amidst the changes that are occurring in the village (Breman and Wiradi, 2004). At the same time they become leaders whose legitimacy is maintained through their services to citizens (Geertz, 1986). When citizens are satisfied with their services, their legitimacy increases. Thus, finally the role of the village government was opened to empower its citizens (Supriatna, 1997). In order to strengthen village institutions, then the Unesa State Administration Study Program in collaboration with the Community and Village Empowerment Service (DPMD) of Bojonegoro Regency conducted a Workshop entitled "Collaboration of Strengthening Village Institutions in the Context of Accelerating the Achievement of Village SDGs in Bojonegoro Regency". The workshop activities were held on Wednesday, November 1, 2022 at the Nahdlatul Ulama University Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro Recreation Hall by inviting representatives of the Bojonegoro Regency DPMD, lecturers of the Bachelor of State Administration Study Program, and 250 representatives of village officials in Bojonegoro Regency whose village officials became students Village RPL Program in State Administration Study Program.

*Purpose* the holding of the Workshop "Collaboration on Strengthening Village Institutions in the Context of Accelerating the Achievement of Village SDGs in Bojonegoro Regency" is to provide understanding to village officials in Bojonegoro Regency about the importance of SDGs and achievement of SDGs in the framework of carrying out sustainable development at the village level. Village SDGs were initiated by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration to provide guidance to village officials in Indonesia so that development in villages becomes more focused. The resource persons for this activity were Evie Oktavia Marini, S.Sos, M.Sc as the Head of the Village/Kelurahan Community Resilience Division at the Bojonegoro Regency Community and Village Empowerment Service and Muhammad Imam Affan T.STP, MH. The description of the workshop implementation is as follows:

Picture8

### Workshops Collaboration to Strengthen Village Institutions in the Context of Accelerating Achievements Village SDGs in Bojonegoro Regency in 2022



Source: Unesa State Administration Study Program Documentation, 2022

On the other hand, the highest joint decision making is a decision made from the results of a village meeting. Village meetings are a critical point for mobilizing change, including in the form of village development to understand new things listed in ideas, concepts, and development indicators from outside the village. Various social institutions that grow in the village reflect the needs of the villagers because they actively participate in discussing development designs. After the idea of progress is agreed upon, a mid-term and annual development plan is drawn up. According to regulations, the plans compiled must refer to the latest village data. The village development planning process usually starts with identifying deficiencies in services, facilities, and components of village progress. The village meeting decided to fulfill aspects that had not yet been realized in the village. To maintain village economic resilience, this can be done by developing village-owned enterprises.

BUMDes can be directed to support the economic businesses of residents who are already developing in the village, so that they develop even more rapidly. According to news from Bojonegorokab.go.id, almost all villages in Bojonegoro Regency have BUMDes which are already legal entities. Out of 419 villages, only 26 villages do not yet have BUMDes. Among the villages

that have BUMDes are divided into 4 categories, namely the advanced category 15 villages, the developing category there are 64 villages, the growing category is 173 villages, and the basic category is 161 BUMDes.

Part of BUMDes profits is required to be a component of Village Original Income (PADes) recorded in the APBDEs, so that it can be used for village development. In addition, PADes can be used to increase village assets. Productive assets which will then become a source of greater PADes which are expected to expand services to villagers. One of the things that can be done to implement the Village SDGs is through training. The RPL program provides theoretical training on good service. RPL gave positive results for residents and village officials. This can be seen from the RPL program being able to influence economic, social, and political conditions because of the insights possessed by village officials who participated in the RPL program.

The enthusiasm for this program was not only felt by village officials who participated in this program. But also felt by the villagers. Villagers have more expectations of the RPL program being implemented. According to Mr. Agus Utomo as the Head of Bakulan Village said that:

"The development felt by the villagers is not only physical development, such as visible infrastructure development. But also about services that are also easier for residents to understand."

## **6. Disposition of the Executor**

The Village SDGs are an alternative effort to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals at the village level. At the national level, making the Village SDGs a goal with indicators in implementing village development will make a major contribution to achieving the Sustainable Development Goals. The SDGs support and accelerate the achievement of Presidential Regulation Number 59/2017 which is a follow-up to the Indonesian government's agreement on a global development document entitled Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, as well as a global development agenda document which contains 17 goals, 169 targets, which is called Sustainable Development Goals (SDGs).

Guidance and supervision is an important step in overseeing the implementation of the Village SDGs which includes capacity building activities, training, technical assistance, and mentoring. Facilities are not enough if only the government does it, but it also needs to be supported by other village activists, such as village leaders, NGOs, universities, international institutions, and even the business world. It is important that assistance is carried out on an ongoing and emancipatory

basis by local actors, as a regeneration effort to maintain the pace of village development. The strength of the initiative and innovation of local cadres becomes cultural capital for the village in the future. Village development that focuses on the strength of local initiatives is more likely to reap success, because it is based on experience and knowledge of local community needs.

The progress and achievements of the villages cannot be separated from the support of the cooperation made with various parties. This means that the achievement of the Village SDGs will depend heavily on the strong commitment and synergy of all parties. Bojonegoro Regency is very supportive of this RPL program and can be seen from the permission given by the village head to employees who will register for this program. In addition, lecture schedules that conflict with work schedules, employees are given permission to attend lectures during their working hours. Similar to what was said by Pak Agus Utomo, explaining:

"In the village where I work there is no special disposition for this matter because there has been a scheme from the start. So no party is harmed for a particular reason. Regional apparatus participating in this program are also given permits according to their needs.

Likewise, what was expressed by Mrs. Wiwik Sri Utami said:

"The available facilities and infrastructure are indeed used to support teaching and learning activities, so if there is a room that you want to use, letters or permits will be given easy access. The disposition is carried out directly to the study program lecturers through the deans of each faculty.

The disposition of the implementing agency is not a hard thing to do. It can be seen that the cooperation built by the implementing agencies has proven that this program is very beneficial for the implementing agencies.

As an effort to maintain the quality of the Village RPL lecture cooperation program, the Bojonegoro Regency Government has given a disposition to the Bojonegoro Regency Community and Village Empowerment Service (DPMD) to carry out technical coordination with the campuses (Unesa and UNY) regarding the implementation of the Village RPL Program lectures. Following up on this, Unesa is also proactively trying to maintain the quality of the Village RPL Program lectures by conducting lecture monitoring and evaluation scheduled per semester. The lecture

monitoring and evaluation was carried out by the Quality Assurance Group (GPM) in each faculty, including the lecture monitoring and evaluation of the Village RPL Program S1 State Administration Study Program which was conducted by the GPM of the Faculty of Social Sciences and Law. Besides that, Field monitoring and evaluation of the Village RPL Program was also carried out by the Unesa LP3 as the coordinator of the Village RPL Program at Unesa. This field monitoring and evaluation was scheduled for Saturday, at the Bojonegoro Regency DPMD Office which was attended by representatives of the Unesa LP3, representatives of the Village RPL program study program, representatives of the Bojonegoro Regency DPMD and representatives in charge of classes from all study programs at Unesa. In the field monitoring and evaluation several things were discussed including the obstacles and input from RPL students during the lecture. The following is a picture of money activities at DPMD Bojonegoro which was held on Saturday, 3 December 2022 as follows: representatives of the DPMD of Bojonegoro Regency and representatives in charge of classes from all study programs at Unesa. In the field monitoring and evaluation several things were discussed including the obstacles and input from RPL students during the lecture. The following is a picture of money activities at DPMD Bojonegoro which was held on Saturday, 3 December 2022 as follows:



Source: Unesa State Administration Study Program Documentation, 2022

## B. DISCUSSION

The Bojonegoro Regency Government is a Regency Government that is quite successful in managing the economy in its 419 villages. this can be seen from the number of BUMDes that are able to be managed until they become legal entities. In this case the management of these resources is also a productive asset so that it becomes a larger PADEs. Implementation is the implementation of a program that has been prepared or formed to achieve a goal. Program implementation can be said to have been implemented properly when those who feel the change are not only implementing agents, namely the Bojonegoro Regency Government and residents, but also policy makers who feel this.

### 1. Policy Standards and Objectives

To increase access to higher education, the Directorate General of Higher Education, Ministry of Education, Culture, Research and Technology, through the Directorate of Learning and Student Affairs, in 2021 will hold a government assistance program for implementing Type A2 Past Learning Recognition. Recognition of Past Learning is recognition of one's learning achievements obtained through formal, non-formal, informal education, or work experience into formal education. This program is based on the legal basis of the Minister of Higher Education Research and Technology Regulation No. 26 of 2016 regarding RPL

**Picture9**

### **Field Monitoring and Evaluation of the Unesa Village RPL Program at the Bojonegoro Regency Community and Village Empowerment Service in 2022**



Guidelines on several legal bases such as the Law on National Education System No. 20 of 2013, Perpres, and PP no. 4 of 2014. With the holding of this program, it is hoped that individuals who do not have time to complete their education (diplomas, degrees,

## **2. Resource**

Human resources and non-human resources are important elements in policy implementation. The human resources in the RPL program consist of the involvement of development actors and the empowerment of village communities who have important values in village development. In this RPL program there are human resources, namely implementing agents and policy makers who are involved in the development and empowerment of village communities. As for non-human resources, such as the provision of a single tuition fee by the Bojonegoro Regency Government, facilities and infrastructure provided by the university and the Bojonegoro Regency Government, as well as policy-making supporters who provide opportunities to improve the quality of existing human resources.

## **3. Inter-Organizational Implementation and Communication Activities**

In line with increasing knowledge about the variety and nature of stakeholders, cooperation also includes at least the community, state and private parties. SDGs are needed to be implemented in villages. This can be done by building a village with total substance, but it is still controlled in a limited area and people. This means that the chances of success in implementing the SDGs in one village and each village are maximized. SDGs are placed in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 13 of 2020 concerning priority use of village funds in 2021. To communicate this program face-to-face is not enough. But it is supported by other media devices such as printed books, website addresses, and video conferencing.

## **4. Characteristics of Executing Agents**

Van Meter and Van Horn argue that from the bureaucratic structure, the characteristics of the implementing agency can be seen. The bureaucratic structure is the characteristics, norms and patterns of relationships that occur repeatedly in the executive body related to the potential possessed by carrying out the policy.

Village SDGs are field policies so that results and benefits are immediately released for village residents. Permendesa PDPTT No 13/2020 shows the legality of the decision and its implementation has started with the formulation of plans for all villages in Indonesia in 2020 regarding the priority of using village funds in 2021,

which means that this decision is legal and binding for 74,953 villages. Village SDGs were chosen as a strategy to accelerate the wheel of village development. The implementation of the SDGs can be seen from the characteristics of implementing agents who contribute to each other to achieve the goals. The characteristics of implementing agents affect the achievement of the program's objectives. If the characters of the implementing agents are mutually supportive, then the goals will also be effective and efficient to achieve. otherwise, then the ineffectiveness and inefficiency of policy implementation can occur. Therefore, the implementation of a program must have binding rules so that the goals can be appropriate.

## **5. Economic, Social, and Political Conditions**

Based on the planning regulations, the planning must refer to the latest village data. The village development planning process usually starts with identifying deficiencies in services, facilities, and components of village progress. The village meeting decided to fulfill aspects that had not yet been realized in the village. To maintain village economic resilience, this can be done by developing village-owned enterprises. BUMDes can be directed to support the economic businesses of residents who are already developing in the village, so that they develop even more rapidly. In this case, prior to the existence of the RPL program, the economic conditions of the Bojonegoro Regency Government had been able to meet the needs of residents in each village. Unlike the case with social conditions, the social conditions experienced by residents changed for the better when the RPL program existed. This can be seen from the enthusiasm of the villagers who are often active in asking questions and village government officials who are also active and responsive about what is lacking in the services provided. The occurrence of these positive changes can be a reference for other villages to become equal or better in realizing the Sustainable Development Program Number 18.

## **6. Disposition of the Executor**

An important step in overseeing the implementation of the Village SDGs is by carrying out coaching and supervision which includes capacity building activities, training, technical assistance, and mentoring. Facilities are not enough if only the government does it, but it also needs to be supported by other village activists, such as village leaders, NGOs, universities, international institutions, and even the business world. It is important that assistance is carried out on an ongoing and emancipatory basis by local actors, as a regeneration effort to maintain the pace of village development. The form of disposition in the implementation of the RPL program is in the form of support coming from various

parties who have the same goals regarding the Village SDGs. According to (Edwards, 1980) stated that the sufficient authority to make their own decisions owned by an institution will influence that institution in implementing policies. So a positive disposition also influences the implementation of policies by implementing agents and policy makers.

## CLOSING

### CONCLUSION

Based on the results of the research conducted by the research team, it can be concluded that the implementation of the Past Learning Recognition Program (RPL) for village officials to achieve Village Sustainable Development Goals (SDGs) in the Bachelor of State Administration Science Study Program, FISH, Unesa has gone well. It is based on an analysis of the following six indicators:

#### 1. Policy standards and objectives

In an effort to increase access to higher education, the Directorate General of Higher Education, Ministry of Education, Culture, Research and Technology, through the Directorate of Learning and Student Affairs, in 2021 is holding a government assistance program for implementing Type A2 Past Learning Recognition. Recognition of Past Learning is recognition of one's learning achievements obtained through formal, non-formal, informal education, or work experience into formal education. This program is carried out in collaboration with many universities, not only state universities but also private universities which are accommodated in the Village Higher Education Forum (PERTIDES).

#### 2. Resource

In order to accelerate the achievement of sustainable development goals and improve the quality of human resources in villages, it is necessary to recognize past learning from work experience in villages as credit courses for pursuing further education at the undergraduate/daughter and postgraduate levels. Because of this, the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration together with Higher Education Providers and scholarship funders implemented Recognition of Village Past Learning (RPL Desa) through a pilot program by the Bojonegoro District Government which provided Single Tuition Fees for around 1,600 RPL Village participants consisting of Village Head, Village Apparatus, BPD members, BUM Des/BUM Desma managers, Assistance Staff (TPP), Village Community Empowerment Cadres (KPM), and other activists domiciled in Bojonegoro Regency. There are facilities provided by the campus in the form of offline and online facilities and infrastructure. Apart from the University, the Village Government in Bojonegoro

Regency has also provided facilities and infrastructure.

#### 3. Implementation and communication activities between organizations

The RPL program begins with the implementation of registration and also the opening ceremony according to the schedule that has been prepared. In addition to the arranged schedule, there are also terms and conditions that must be met by prospective participants in the RPL program. Then it was selected by the University to find out the criteria for potential participants. At the time of RPL registration, the Bachelor of State Administration Study Program was attended by 325 prospective participants. In the selection process, only 295 RPL students. Only 282 students of RPL Study Program S1 State Administration were active and were divided into 6 classes. The implementation of the lecture begins with an opening which is attended by the implementor with the aim of the students knowing and getting to know what is done offline at the Unesa Graha Building.

#### 4. Characteristics of the implementing agency or organization

With the RPL class totaling 6 classes, it certainly adds to the burden of teaching assignments for lecturers in the Study Program. However, in the Bachelor of State Administration Study Program, the campus, like the lecturers, enjoy their role. It's just that the comparison of working hours is sufficient to exceed the capacity of working hours than usual. However, campus implementing agents can handle this matter well. It can be proven during online lectures through discussions with active responses and inspiration from students who share innovations and programs as well as experiences in each village of RPL program participants. This provides the benefit of confidence when issuing opinions during office meetings.

#### 5. Economic, social, and political conditions

To strengthen village institutions, Unesa's Bachelor of Science in State Administration in collaboration with the Community and Village Empowerment Office conducted workshops with the aim of providing understanding to village officials in Bojonegoro Regency so that village development becomes more focused on the importance of implementing SDGs and achieving SDGs. The RPL program provides theoretical training on good service. RPL gave positive results for residents and village officials. this is evidenced by the insights that have been possessed by village officials who have participated in the RPL program. The enthusiasm for this program was not only felt by village officials who participated in this program. But also felt by the villagers. Villagers have more expectations of the RPL program being implemented.

## 6. Disposition of the executor

The progress and achievements of the villages cannot be separated from the support of the cooperation made with various parties. This means that the achievement of the Village SDGs will depend heavily on the strong commitment and synergy of all parties. Bojonegoro Regency is very supportive of this RPL program and can be seen from the permission given by the village head to employees who will register for this program. In addition, lecture schedules that conflict with work schedules, employees are given permission to attend lectures during their working hours. In an effort to maintain the quality of lectures for the Village RPL program, Unesa also actively conducts monitoring and evaluation which is scheduled every semester which is carried out by the Quality Assurance Group (GPM) of the Faculty of Social and Legal Sciences, Unesa RPL program study program, Unesa LP3, Community and Village Empowerment Service (DPMD) ),

## SUGGESTION

Based on the results of the research and discussion that has been done, for further research it is better to:

1. Can describe the characteristics of implementing agents or implementors in more detail so that the goals and intentions of implementing the RPL program for village officials to achieve Village Sustainable Development Goals (SDGS) can be an evaluation
2. Can describe the economic, social and political conditions of the village government which further research will do

## BIBLIOGRAPHY

Iskandar, AH (2020). Village SDGs to Accelerate the Achievement of Sustainable Development Goals. Jakarta: Indonesian Torch Library Foundation.

Bojonegoro Regency Government. (2022, November 26). 393 Villages in Bojonegoro Have BUMDes. Bojonegoro, East Java, Indonesia.

Bagiastuti, NK, Damayanti, IW, & Astuti, NS (2020). MODEL FOR DEVELOPMENT OF PAST LEARNING RECOGNITION TO STRENGTHEN INDONESIA'S NATIONAL QUALIFICATION FRAMEWORK. ISAS Publishing, 556-561.

Bappenas. (2015, November 26). [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id). Retrieved from Bappenas web site:<http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/berita-harianbappenas/concept-sdgs-post-2015-development-framework/>

Breman, JG, & Wiradi. (2004). Bright Times and Scary Times in Rural Java, A Study of Soiso-Economic

Dynamics in Two Villages Towards the End of the 20th Century. In F. Husken, Village Communities in Changing Times, History of Social Differentiation in Java 1830-1980 (p. Translation). Jakarta: LP3ES.

Budi, W. (2008). Public policy. Jakarta: Our Book.

Budiono, & Puspa, I. (2018). Thesis: Analysis of the Implementation of the Program for the Acceleration of Nurse Education Through the Mechanism of Recognition of Past Learning (RPL) at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III. PPSDM Health Agency.

Edwards III, & George C. (2003). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Edward, GC (1980). Implementing Public Policy. In J. Widodo, Policy Analysis. Washington DD: Congressional Quarterly Inc.

Geertz, C. (1986). Modjokuto: Social Dynamics of a City in Java. Jakarta: Graffiti Pr.

Irhamyiah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) and Their Impact on National Resilience. Research Journal of Lemhannas RI, 46-48.

Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transformation. (2022). Guide to Village Past Learning Recognition Undergraduate Program (RPL Desa) 2022-2024. Jakarta: Human Resources Development and Community Empowerment Agency for Villages in Disadvantaged Regions and Transmigration.

Leo, A. (2006). Politics and Public Policy. Bandung: AIPL.

Leo, A. (2012). Fundamentals of Public Policy. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2015. Qualitative Research Methods, Bandung: PT REMaja Rosdakarya Nugroho, R. (2011). Public Policy: Policy Dynamics, Policy Analysis, Management *Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pressman, J., & Wildavsky. (1973). Implementation. Barkley and Los Angeles: University of California Press.

Priadi, AA, Nugroho, E., & Sularno, H. (2019). Ship Engineering Professional Certification Model Design for Lecturers with. Journal of Sea Transportation Research, 13-18.

Personal, RE (2017). IMPLEMENTATION OF

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) IN  
IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN  
PAPUA. *eJournal of Science*  
*International Relations*, 917.

Samudra, W. (2004). *Public Policy Process and  
Analysis*. Jakarta.

Sugiyono, 2012. *Quantitative, Qualitative and R & D  
Research Methods*. Bandung: Alfabeta

Supriatna, T. (1997). *Bureaucracy, Empowerment and  
Poverty Alleviation*. Bandung: Humaniora Utama Press.